

VI

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MED JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2008

KABINET

Presiden Diminta Tunjuk Menko Perekonomian Baru

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera menunjuk Menko Perekonomian baru, mengingat gejolak perekonomian dan ketidakpastian global saat ini. Selain berkapasitas pakar dan profesional di bidang ekonomi, Menko Perekonomian baru harus memiliki pengalaman di birokrasi karena berguna untuk fungsi koordinasi.

Ekonom Indef Fadhil Hasan mengatakan, Presiden jangan mengusung rangkap jabatan untuk Menko Perekonomian oleh menteri lainnya di Kabinet Indonesia Bersatu. Jabatan Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono karena ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia harus menjadi prioritas dan tidak dikesampingkan maknanya dengan rangkap jabatan.

"Rangkap jabatan itu

tidak baik, karena akan melemahkan kinerja di bidang perekonomian. Lebih baik sisa satu tahun jabatan Menko Perekonomian diberikan pada orang yang benar-benar profesional demi efektivitas," kata Fadhil.

Dia jelaskan, pengalaman di birokrasi dan bidang perekonomian menjadi hal utama dalam menentukan sosok yang akan menjabat Menko Perekonomian.

Nama-nama yang santer disebut sebagai pengganti Boediono meliputi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala BRR Kontoro Mangkusubroto, ekonom Dr Syahrir, dan Tanri Abeng. Juga disebut-sebut bahwa jabatan Menko Perekonomian akan dirangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, Fadhil menolak jika Menkeu Sri Mulyani menjabat Menko Perekonomian, karena beban kerjanya sudah berat. (Indra)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Menkeu Layak Ganti Boediono

JAKARTA (SINDO) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Boediono sebagai pelaksana tugas (plt) menteri koordinator bidang perekonomian (menko perekonomian). Kabar itu sudah santer berkembang di lingkungan Istana Negara.

Bahkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa tidak membantah kabar tersebut. "Ya kalau sudah bisa membaca tanda-tanda zaman syukurlah. Kalau yang pasti, ini kan kita hanya membaca saja," ungkap Hatta di Wisma Negara Jakarta kemarin.

Menurut dia, Sri Mulyani merupakan menteri yang pantas menjabat sebagai plt menko perekonomian bila dilihat dari caranya menyampaikan pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disiarkan serentak di seluruh jaringan televisi pada Jumat (23/5).

Ketika ditanya apakah Sri Mulyani cukup mampu menjabat sebagai plt menko perekonomian, Hatta tidak menjawab secara tegas. "Kalau di dalam fungsi koordinatif kan ada koordinasinya juga dengan Bapak Presiden, koordinasi dengan Wapres. Jadi saya kira, siapa pun nanti yang di-

tunjuk pasti menguasai," ujarnya.

Rencananya, awal pekan mendatang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengumumkan plt menko perekonomian menggantikan Boediono yang saat ini telah menjadi Gubernur Bank Indonesia

(BI). Presiden SBY akan menyampaikan secara langsung penunjukan plt menko perekonomian.

Sebelum nama Sri Mulyani muncul dalam bursa pencalonan plt menko perekonomian, ada beberapa nama lain yang sempat muncul. Dia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Namun, belakangan, nama Purnomo mulai menghilang. Ada beberapa kalangan yang menilai bahwa hilangnya nama Purnomo akibat desakan politik dari DPR yang menolak kehadirannya.

Namun, hal itu langsung dibantah Hatta. "Ah tidak (benar) itu. Yang pasti tahu kan Bapak Presiden," ujarnya singkat.

Yang jelas, tandas dia, yang berwenang menentukan posi-

si menko perekonomian adalah Presiden. Menurut Hatta,

posisi plt sebelumnya pernah terjadi di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kata dia, posisi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (menko polhukam) dan menteri koordina-

tor bidang kesejahteraan rakyat (menko kesra) dirangkap oleh plt.

Rangkap jabatan seperti itu, menurut dia, bukan merupakan sesuatu yang dapat menghambat kerja kabinet. "Waktu itu (pemerintahan Megawati Soekarnoputri), posisi menko kesra dijabat Malik Fajar yang juga sebagai menteri agama. Kemudian, untuk menko polhukam dijabat menteri dalam negeri. Semua berjalan dengan baik sampai berakhir masa jabatan," tambahnya.

Sementara itu, Sri Mulyani yang dimintai konfirmasi mengenai kabar pencalonan dirinya menolak untuk berkomentar. "Saya tidak mau berkomentar dulu soal itu. Nanti saja tunggu Presiden yah," ujarnya.

(rarasati syarief)



DOK.SINDO

SRI MULYANI

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 16

TAHUN 2008

Menko Perekonomian Mungkin Dirangkap Menkeu

JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengungkapkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemungkinan besar ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) menko perekonomian yang kosong setelah Boediono dilantik menjadi gubernur Bank Indonesia (BI).

"Saya melihat *kayaknya* Sri Mulyani sudah pantas. Semalam (saat pengumuman kenaikan harga BBM), beliau terlihat luwes tapi *firmed*. Iklan di TV juga terlihat enak. Sepertinya pantas *yah*," ujar Hatta di Istana Presiden Jakarta, Sabtu (24/5).

Namun, Hatta menolak mengatakan bahwa pernyataannya itu berarti Presiden SBY sudah memutuskan Sri Mulyani akan menjadi plt menko perekonomian.

Sri Mulyani di tempat yang sama menolak berkomentar. Secara terpisah, Menneq PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan dukungannya kepada Sri Mulyani. "Saya merasa dia cocok, tapi nanti diputuskan Presiden," katanya.

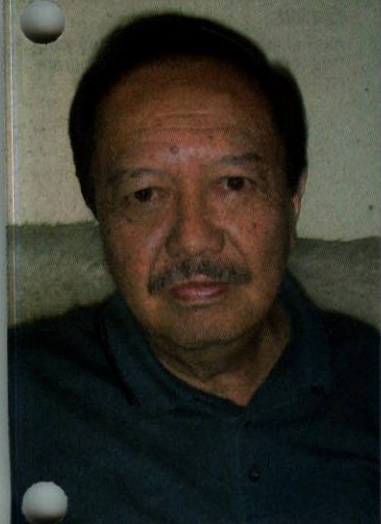
Beberapa nama disebut-sebut berpeluang menggantikan Boediono, seperti mantan Menneq Pemberdayaan BUMN Tanri Abeng dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. (ant/c117)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<p> <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA </p>	<p> <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/> </p>										
<p> KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF </p>											
<p> JAN FEB MAR APR <u>MET</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31 </p>											
HALAMAN : 25										TAHUN 2008	

**Wawancara dengan Prof. Dr. Tb. Zulriska Iskandar, M.Sc.
Psikolog Sosial Unpad**

Mereka Butuh Bantuan Darurat



FEBY SYARIFAH/PR

Iskandar.

Pendapat Anda terhadap program BLT pascakenaikan BBM?

Kalau kita melihat BLT secara jernih, program ini di luar negeri pun ada dan dikenal dengan nama *social security* (pengamanan sosial-red.). Biasanya diberikan kepada para pengangguran atau para manula. Jadi, kalau kita berpikir objektif, BLT bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tapi, di Indonesia, menjadi luar biasa karena kondisi masyarakat kita sendiri saat ini.

Kondisi masyarakat yang Anda maksud?

Ya, kondisi mental bangsa kita saat ini yang tidak memiliki motivasi untuk berprestasi yang baik. Ditambah nilai-nilai pribadi yang kurang menunjang untuk mereka mau berkarya, sehingga menjadikan program BLT ini seolah-olah membuat orang menjadi malas. Padahal, di satu sisi, orang-orang miskin di Indonesia saat ini butuh bantuan darurat.

Jadi apakah program BLT ini positif atau justru malah tidak mencerdaskan masyarakat karena berakibat membuat malas tadi?

Saya pikir terlalu berlebihan jika menyebut program BLT ini sebagai program yang tidak mencerdaskan rakyat. Karena, bagaimanapun, BLT merupakan program bantuan darurat untuk rakyat miskin dan sangat miskin karena kenaikan BBM. Jadi, mereka benar-benar membutuhkannya. BLT ini bisa di-

bilang tindakan penyelamatan pertama pada kecelakaan yang sifatnya jangka pendek.

Tapi, banyak juga masyarakat bahkan kepala desa (kades) yang menolak program BLT ini. Pendapat Anda?

Saya pikir mereka menolak karena belajar dari pemberian BLT sebelumnya, di mana banyak orang miskin yang tidak mendapat BLT, dan sebaliknya orang-orang yang tidak miskin malah dapat. Jadinya tidak tepat sasaran dan banyak mendapat protes dari masyarakat. Atau bisa jadi mereka kurang mendapat sosialisasi yang baik dari pemerintah mengenai kenaikan BBM dan mengenai BLT itu sendiri.

Terkait banyaknya kepala desa yang menolak BLT, saya pikir mereka melakukan itu karena tidak mau terkena jeratan hukum atau tidak mau kesusahan. Tapi, menurut saya, tindakan kepala desa yang seperti itu justru tidak bertanggung jawab karena rakyat miskin di wilayahnya pasti membutuhkan BLT tersebut.

Kalau di luar negeri, bagaimana sambutan warga terhadap program "security social" seperti ini?

Mereka cukup antusias. Tapi, bagi usia produktif, biasanya akan malu jika terdaftar dan mendapat bantuan pengamanan sosial. Sebab, mereka memiliki motivasi yang baik untuk berprestasi, dan maunya bekerja. Mereka tak mau sekadar menerima bantuan begitu

saja dari pemerintah. Nah, kalau di kita ini justru sebaliknya. Yang usia produktif dan tidak semestinya menerima BLT malah berlomba-lomba untuk mendapat jatah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita memang belum matang.

Apa yang menjadi faktor penyebab tidak matangnya kondisi psikis sosial masyarakat kita?

Variabel paling penting adalah ekonomi. Khususnya tingkat penghargaan terhadap pekerja yang tak adil. Kalau di luar negeri, semakin keras seseorang bekerja, akan semakin besar *reward* yang dia dapat. Oleh karena itu, motivasi mereka untuk bekerja pun semakin tinggi. Tapi, di Indonesia, cenderung meremehkan para pekerja atau buruh. Gaji mereka pun tak layak.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk tak membuat semakin parah kondisi mental bangsa ini, pascakenaikan BBM dan pemberian BLT?

Harus ada program motivator berkelanjutan yang diberikan pemerintah setelah program pemberian BLT yang sifatnya darurat ini. Program padat karya atau pelatihan-pelatihan khususnya kepada para usia produktif harus digalakkan pemerintah setelah BLT. Sehingga mental mereka bisa lebih kuat dan akan mampu *survive* atau bertahan jika kelak harus berhadapan kembali dengan resesi global seperti sekarang. (Feby Syarifah/PR)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 6 TAHUN 2008	

Reallocating subsidies

The public acceptance of the 28.7 percent increase in fuel prices which the government announced Friday evening, will hinge on perceptions of how the upcoming economic burdens will be shared, and how well the distribution of income-support for affected families will be managed.

The government must therefore go all out to convince people (with concrete measures and examples) that its painful fuel policy is really a necessity and is in the public's best interest.

It needs to affirm that the move is based on genuine principles of equitable burden-sharing, otherwise the bitter pills could cause a wave of social unrest at the expense of economic and political stability.

At a time when an increasing number of people have been suffering economic hardships, and when unemployment — already at a potentially explosive level — would likely worsen, the additional burdens caused by the price rise look likely to incite public anger.

But the government has made thorough preparations with special social-safety net programs to cushion the impact of the fuel reform on poor people. It has attempted to protect the poor from the brunt of the price increases through the distribution of income support (cash transfers), subsidized rice and educational grants for 19.1 million families (almost 75 million people). The government has also expanded poverty alleviation programs — with more than Rp 150 trillion (US\$16 billion) budgeted for this year alone.

The fuel-price increase may double inflation, to 12 percent throughout this year, which will no doubt hit low- and fixed-income earners and the poorest bracket of the community the hardest. But the various forms of income support and massive poverty alleviation programs will help cushion the adverse effects.

The public's sense of fairness will also depend on perceptions of whether the government is taking its full share of the burden by minimizing waste caused by inefficiency and corruption and by truly behaving and acting out of a sense of urgency and crisis.

The strict expenditure guidelines issued by the Finance Minister for senior officials (such as severe restrictions on official travel) will serve to help

92

strengthen the spirit of austerity within the public sector. Such an example would also serve to improve the social and political environment during the implementation of this painful measure.

Favorable public opinion is necessary to smoothen the transition period of the fuel reforms, but the government must also realize that it is not the poor majority but the middle- and top-income earner groups who often dominate public debates. Vested-interest politicians in the House could make a lot of noise, deceiving the public to advance hidden political agendas.

Former presidents and former presidential candidates who have opposed fuel reform — and who will try to exploit the current situation to increase their popularity in next year's general and presidential elections — are well advised to note that fuel subsidies have nothing to do with voter support nor a voter backlash.

Just look at how the then incumbent president Megawati Soekarnoputri failed miserably in the 2004 presidential elections, even though she had refused to increase fuel prices.

She chose to leave a "fiscal time bomb" for President Susilo Bambang Yudhoyono, who was then forced to defuse it with a cumulative price increase of more than 155 percent in 2005.

Even the common people understand that fuel reforms, however painful, are firmly grounded in sound economic rationale and a sense of justice because the huge fuel subsidies have, so far, been enjoyed by the middle-and top-income bracket.

Instead of attacking the Yudhoyono administration, we should commend it for its courageous decision to take on such a bold move, however unpopular it is.

Yudhoyono could choose the easier populist measure, by continuing the wasteful subsidy spending, but this would risk leading the economy into a much more devastating crisis within one to two years.

If opponents to the fuel price increase truly want to help the poor, they should help supervise the implementation of the social-safety net and poverty alleviation programs to ensure that the billions of dollars of additional funds derived from the fuel reform reach their target beneficiaries (poor families).

92

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

Menyikapi Kenaikan Harga BBM dan BLT

PEMERINTAH menurut rencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan kisaran 20%-30%. Diperkirakan jika BBM naik nanti, harga kebutuhan pokok lain juga akan melambung. Masyarakat diimbau agar tidak mengambil untung dari kondisi perekonomian rakyat yang kian terjepit. Hal itu diperlukan agar harga barang tetap terjaga seminimal mungkin.

Dalam waktu dekat ini Departemen Keuangan, Bappenas, dan Departemen Sosial akan melakukan pengkajian tentang besaran kenaikan harga BBM dan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan kepada keluarga miskin. Kenaikan harga BBM maksimal adalah 30%, sedangkan penerima BLT bila menggunakan data lama sebanyak 16,1 juta orang miskin.

Pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp100.000 per bulan selama setahun kepada 19,1 juta kepala keluarga miskin sebagai keluarga yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM. Selain itu, pegawai negeri sipil, polisi, dan anggota TNI paling rendah juga akan menerima bantuan BLT. Jumlah BLT plus yang akan dikucurkan kepada rakyat miskin itu Rp14 triliun. Tiap bulannya per KK diberi Rp100 ribu. Bantuan itu akan disalurkan selama 7 bulan, dibagikan per 4 bulan dan per 3 bulan sekali. Kemudian juga disalurkan ke beras untuk rakyat miskin dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2008, tentang program BLT untuk rumah tangga. Inpres ini sebagai payung hukum dalam program kompensasi kenaikan BBM kepada rakyat miskin. Mengenai kemungkinan ada penyimpangan dalam penyaluran BLT, kartu yang akan diberikan kepada masyarakat miskin diberi tanda khusus. Juga disesuaikan dengan data terbaru mengenai orang miskin yang akan segera dikeluarkan oleh BPS.

Pemerintah menjamin pelaksanaan pemberian BLT plus kepada rakyat miskin kali ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang lalu. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama untuk tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan agar stabilisasi harga tetap terjaga seminimal mungkin.

Ir Rahmat Gasminto
Kompleks Migas Joglo
Slipi, Jakarta Barat
pipa_ledeng@plasa.com

93

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT **25** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

KEMISKINAN

Pemerintah Mulai Salurkan Dana BLT Tahap Pertama

JAKARTA (MI): Dana bantuan langsung tunai (BLT) mulai dibagikan, kemarin, di sepuluh kota. Secara keseluruhan, penyaluran dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tersebut berjalan lancar.

BLT tahap pertama disalurkan di 10 kota dengan jumlah sasaran sebanyak 844.730 kepala keluarga.

Pembagian dana BLT di beberapa daerah sempat diwarnai ketegangan karena adanya warga tidak terdaftar.

Di Kota Yogyakarta, pembagian dana BLT diwarnai ketegangan di tingkat kelurahan. Warga yang tidak mendapat dana BLT mendatangi kelurahan.

Hal itu terjadi di Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta.

Lurah Prawirodirjan Cahya Widayanto menyarankan warga miskin yang tidak menerima dana BLT agar mengadu ke Posko Pengaduan di Balai Kota Yogyakarta.

Namun, di posko itu hingga pukul 12.00 WIB kemarin, baru masuk sembilan pengaduan.

Di Bandung, Jawa Barat, pencairan dana BLT sempat ricuh. Di Kantor Pos Andir, Kelurahan Malabar, Kecamatan Andir, kemarin, ricuh karena seorang

warga tiba-tiba mengamuk karena tidak menerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sementara itu, kalangan perangkat desa di Kabupaten Madiun menyatakan tidak mau dilibatkan dalam penyaluran kartu BLT. Sikap tersebut diambil dalam pertemuan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Madiun yang diikuti sekitar 200 kepala dan perangkat desa se-Kabupaten Madiun.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, saat meninjau penyaluran BLT di Kantor Pos Condet, Jakarta, mengatakan data terbaru penerima BLT akan selesai September mendatang. Itu merupakan pembagian dana BLT tahap dua.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan penyaluran dana BLT akan dilanjutkan di 24 kota. Antara lain, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Banda Aceh. "Insya Allah, pada 15 Juni 2008, semua kartu BLT sudah disampaikan ke seluruh Indonesia," ujarnya.

(Tim/N-1)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

DPR Usul Bentuk Tim Pengawas BLT

JAKARTA (Suara Karya): DPR mengusulkan pembentukan tim pengawas penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demikian dikemukakan Ketua DPR HR Agung Laksono, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin. Hal itu dikatakan Agung menanggapi penyaluran BLT yang dilakukan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sejak Sabtu (24/5).

"DPR perlu berinisiatif membentuk tim monitoring dan pengawasan dana BLT. Ini penting, karena menyangkut pelaksanaan salah satu pos anggaran negara dalam APBN," katanya.

Menurut Agung, kompensasi dalam bentuk pemberian dana BLT dan lain-lain, tidaklah cukup signifikan memberi solusi atas penderitaan rakyat di berbagai daerah.

Soal keinginan anggota DPR menyampaikan hak angket kenaikan BBM, Agung mengatakan, itu merupakan hak anggota dewan. "Hak anggota DPR tersebut, bisa dalam bentuk

hak angket atau hak interpelasi. Karena, kedua hak anggota DPR itu diatur dalam konstitusi," katanya.

Meski demikian, Agung mengingatkan agar penggunaan hak tersebut, memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga bisa menjadi usul DPR secara institusi.

"Sebagai Ketua DPR, saya tidak ada masalah jika ada sejumlah keinginan dari fraksi-fraksi dan anggota yang menggalang hak angket atau interpelasi. Silakan saja sepanjang mengikuti prosedur," ujarnya.

Munculnya keinginan dari sejumlah fraksi untuk mengusulkan hak angket atau hak interpelasi itu, dipicu dari keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR, menginginkan pemerintah mencari opsi lain selain menaikkan harga BBM.

"Mungkin anggota-ang-

gota itu ingin minta penjelasan pemerintah karena penjelasan baik pra maupun pasca pengumuman dianggap belum cukup. Termasuk soal BLT," ujarnya.

Interpelasi

Kalangan muda DPR yang tergabung dalam Koalisi Muda Parlemen Indonesia (KMPI) menggalang dukungan untuk mengusulkan penggunaan hak interpelasi dan hak angket untuk menyikapi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Sejumlah anggota KMPI mengemukakan hal itu di Jakarta, kemarin, antara lain Yuddy Chrisnandy (Partai Golkar), Ruth Nena Kerdang (PDS), Marauar Sirait (PDIP), Abdullah Azwar Anas, Ana Muawanah (PKB) dan Syahrin Hamid (PAN).

Yuddy Chrisnandy mengemukakan, menaikkan harga BBM merupakan opsi terakhir. Persoalannya, masyarakat tidak tahu apakah pemerintah sudah melakukan opsi lainnya sehingga pemerintah kemudian memutuskan kenaikan harga BBM.

Di lain pihak, Bupati Kutai Timur yang juga Ca-

lon Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengimbau para kepala daerah untuk mendukung pemerintah pusat dengan tidak menolak BLT bagi masyarakat setempat. "Uang BLT itu hak rakyat. Kepala daerah harus memastikan dana BLT sampai ke tangan mereka," ujarnya.

Menurut Awang, pemerintah daerah adalah birokrasi di tingkat daerah dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, setiap ada kebijakan pemerintah, maka kepala daerah harus mendukung.

Awang mengatakan, agar masyarakat di daerah bisa sejahtera, maka pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan masyarakat setempat, salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan agribisnis seperti pertanian.

"Kutai Timur membantu para petani dan rakyat miskin dengan mereformasi agraria. Kami memberi petani lahan masing-masing 5 hektare. Saat ini sudah 38 ribu petani Kutai Timur yang memperoleh sertifikat," ucapnya. (Rully/Sugandi)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/> O 																																											
<p>KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF</p>																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td><td style="width: 10%;">FEB</td><td style="width: 10%;">MAR</td><td style="width: 10%;">APR</td><td style="width: 10%; text-align: center;"><u>MEI</u></td><td style="width: 10%;">JUN</td><td style="width: 10%;">JUL</td><td style="width: 10%;">AGST</td><td style="width: 10%;">SEPT</td><td style="width: 10%;">OKT</td><td style="width: 10%;">NOV</td><td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td style="text-align: center;"><u>26</u></td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	<u>MEI</u>	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	<u>26</u>	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	<u>MEI</u>	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	<u>26</u>	27	28	29	30	31														
<p>HALAMAN : 7</p>		<p>TAHUN 2008</p>																																										

Sumbangan BBM terhadap Inflasi Sangat Besar

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tingkat inflasi pada periode Mei 2008 mencapai sekitar 1 persen. Ini terutama dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku Sabtu (24/5) pukul 00.00 WIB.

"Inflasi bulan Mei akan lebih tinggi dibanding April 2008 yang mencapai sebesar 0,57 persen," kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Rusman, BBM merupakan salah satu komoditas yang memberikan bobot sumbangan inflasi terbesar setiap bulan atau mencapai sekitar 1,7 persen.

"Karena bulan Mei akan berakhir dalam satu pekan lagi, maka sumbangan kenaikan BBM terhadap inflasi akan mencapai sekitar 0,425 persen,"

tuturnya.

Sehingga dengan tambahan inflasi yang juga disumbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok pada tiga pekan sebelumnya, maka menjadikan inflasi akan mencapai sekitar 1 persen. Dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat bersifat langsung, karena hampir sebagian besar kegiatan masyarakat terkait dengan energi.

"Untuk bulan Mei masih sekitar 0,425 persen. Namun untuk bulan Juni sumbangan BBM terhadap inflasi akan sangat besar. Sedangkan bulan Juli dampaknya semakin mengecil dan Agustus akan mencapai keseimbangan baru," katanya.

Rusman menambahkan, besaran tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM secara historis juga pernah dialami ketika pe-

merintah menaikkan harga pada tahun 2005. Dengan kenaikan BBM dan kebutuhan pokok lainnya itu, tingkat inflasi tahunan (*year on year*) atau Juni 2008 terhadap Juni 2007 bisa menembus tingkat 10 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) diingatkan agar jangan sampai terlambat mengantisipasi kenaikan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan pasar pada rupiah. "Potensi inflasi bisa mencapai 11-12 persen. Itu perlu segera diantisipasi," kata Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo.

Meski demikian, dia mengharapkan BI tidak terlalu panik dan langsung menaikkan suku bunga acuan BI (*BI Rate*) secara drastis, misalnya mencapai 50 basis poin atau le-

bih. Ini justru akan memicu terjadinya ekspektasi inflasi. "Suku bunga diharapkan menuntun pasar agar ekspektasi inflasi tetap berada dalam kondisi yang terjaga," ujarnya.

Dia menambahkan, inflasi yang cenderung meningkat tersebut dipengaruhi oleh faktor fundamental dari sisi pasokan, yaitu kenaikan biaya produksi dan harga komoditas bahan baku. "Kenaikan suku bunga bisa kelipatan 25 basis poin. Namun syaratnya adalah laju inflasi yang sangat tinggi dan kepercayaan terhadap rupiah yang anjlok," ujarnya.

Beberapa pengamat sebelumnya memperkirakan, BI akan menaikkan suku bunga secara moderat untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang diperkirakan bisa menembus 11 persen. (Indra)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ KORAN KONTAN ○ MEDIA INDONESIA ○ NERACA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SUARA KARYA ○ SEPUTAR INDONESIA ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST ○
<p>KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI</p> <p style="padding-left: 100px;"><input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM</p> <p style="padding-left: 100px;"><input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF</p>	
<p>JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31</p>	
<p>HALAMAN : 1 TAHUN 2008</p>	

Kenaikan harga BBM jadi hambatan politik

Oleh DIDIK J. RACHBINI
Ekonom & anggota DPR

Beberapa bulan ini pemerintah bergelut dengan tekanan faktor eksternal terhadap ekonomi dan APBN.

Ketika rencana APBN dibahas menjelang akhir 2007 hampir semua asumsi dari rancangan anggaran sangat optimistis. Bahkan pesan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi perlu digenjut sampai 7%.

DPR bertanya-tanya sambil bergurau 'apa bisa mencapai angka pertumbuhan sebesar

itu?' Senda gurau seperti itu semakin nyata tidak dapat dijawab ketika banyak asumsi berubah drastis.

Asumsi lainnya adalah harga minyak yang diusulkan pemerintah US\$57 per barel, tetapi kemudian ditetapkan asumsi US\$60 per barel sebelum ada perubahan. Pada saat perencanaan itu, pengeluaran dipaksakan digenjut, sehingga defisit mencapai 1,7% dari PDB atau sebesar



Didik J. Rachbini

Rp73,1 triliun.

Sekarang dengan perubahan berbagai asumsi itu, defisit sudah 2% dari PDB. Defisit ini berarti peningkatan dua kali lipat dari defisit pada 2007, yakni 1,1% dari PDB, atau Rp40,5 triliun. Saat ini, semuanya sudah berubah karena harga minyak mentah dunia telah melejit sampai US\$135 per barel.

Defisit anggaran terus membengkak, sehingga pemerintah terpaksa berutang lebih besar lagi. Utang luar negeri tidak mudah, karena harus melakukan lobi keluar negeri dan sekarang semakin tidak populer.

Untuk membiayai defisit tersebut pemerintah merencanakan menerbitkan surat utang neto sebesar Rp73,1 triliun. Sasaran produksi minyak mentah juga sangat optimistis dalam perencanaan awal APBN 2008. Produksi minyak mentah diproyeksikan mencapai 1,034 juta barel per hari.

Namun, kenyataannya produksi maksimal minyak mentah yang dapat dicapai hanya sekitar 900.000 barel per hari, sehingga selisih produksi dan konsumsi semakin lebar.

Selama pembahasan rancangan APBN 2008 sampai dengan sekarang, ancaman fluktuasi harga minyak mentah dunia terus berlanjut. Harga yang terbentuk melonjak tajam, tidak main-main. Hanya dalam beberapa bulan harga minyak mentah dunia naik lebih dari dua kali lipat dari yang ditetapkan dalam asumsi APBN tersebut.

Pemerintah, masyarakat, dan semua kalangan terus menghadapi risiko ekonomi, terutama perlambatan pertumbuhan sampai stagnasi, karena faktor energi dan minyak mentah. Tidak hanya har-

ga minyak mentah dunia yang naik, tetapi juga harga pangan yang juga menjadi bahan baku energi alternatif.

Risiko lainnya adalah pengaruh perlambatan ekonomi dunia, yang akan memengaruhi pasar komoditas Indonesia di luar negeri. Hal ini tentu akan berujung pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hambatan

Namun, di sisi lain kemampuan internal pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi terkendala oleh mesin birokrasi. Banyak faktor lain secara internal, yang melemahkan ekonomi bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah menghadapi hambatan ekonomi politik dalam menentukan pilihan kebijakan yang rasional.

Pemerintah telah memilih jalan yang dianggap rasional secara ekonomi dengan menyesuaikan harga eceran BBM, baik premium dan solar maupun minyak tanah. Pilihan ini mengandung risiko dan konsekuensi baru, terutama tekanan pada harga dan inflasi, yang akan melambung sampai dua digit.

Tekanan ekonomi akan terjadi pada masyarakat bawah, yang secara bersamaan disapu dengan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT). Faktor ini berhubungan dengan sta-

bilitas sosial.

Pada saat yang bersamaan memang dilancarkan kebijakan subsidi langsung ke lapisan bawah masyarakat, yang sedikit banyak akan mendinginkan keadaan. Jumlah pengalihan subsidi itu tergolong sangat besar, sehingga tekanan demonstrasi terhadap pemerintah diperkirakan tidak akan meluas dengan kebijakan pengimbang tersebut.

Inilah yang dianggap sebagai pilihan pahit, tetapi dinilai cukup rasional oleh pemerintah untuk dijalankan ketika menghadapi tekanan harga minyak mentah dunia dan gejolak ekonomi eksternal. Tidak hanya itu, tekanan internal pun—dari masyarakat bawah—cukup kuat dan potensial digalang untuk menentang pemerintah dan kebijakannya.

Argumentasi yang menolak kenaikan harga BBM juga ber-alasan, tetapi belum sampai pada pilihan kebijakan apa yang dapat dijalankan jika fungsi APBN mengalami deteriorasi, karena digerus subsidi tidak substansial kepada golongan atas.

Argumentasi lain adalah dampak dan ongkos sosial dari kenaikan harga BBM tidak bertanggung bagi golongan miskin, sehingga kebijakan kenaikan harga dianggap lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun, argumen-

tasi itu tetap pasif terhadap perubahan faktor eksternal tetap yang akan menghilangkan kemampuan pemerintah menjalankan kebijakannya jika APBN tumpul akibat beban subsidi.

Lalu apa yang mesti dilakukan setelah harga BBM dinaikkan? *Pertama*, kebijakan jangka pendek meredam pengaruh tekanan harga adalah penguatan golongan bawah melalui subsidi seperti yang telah dijalankan. Banyak sekali kontroversi terhadap kebijakan ini, tetapi argumentasi 'perut tidak bisa menunggu' dijadikan alasan mengenai perlunya subsidi langsung kepada rakyat.

Kedua, kebijakan perluasan kesempatan kerja selayaknya dijalankan bersamaan dengan subsidi langsung itu, karena dianggap lebih produktif. Apa yang bersifat jangka pendek memang datang dari program pemerintah yang memanfaatkan anggaran negara. Namun, yang lebih berkesinambungan adalah kreasi sektor swasta, baik formal maupun informal.

Ketiga, biang keladi kisruh ini tidak lain karena subsidi yang besar terhadap BBM dan PLN yang menggunakan bahan bakar minyak. Kebijakan energi jangan lembek seperti saat ini, tetapi harus mutlak berubah tidak hanya mewacanakan pentingnya biofuel, gas, panas bumi, dan energi

alternatif lainnya.

Penggunaan energi di luar minyak bumi secara sistematis harus sudah diukur semakin besar dari waktu ke waktu. Hal ini agar ketergantungan kepada minyak bumi terus menurun, sehingga dapat mengurangi subsidi.

Keempat, pertumbuhan ekonomi dijaga pada level setidaknya moderat dengan kualitas pertumbuhan yang memadai, sehingga memberi kesempatan kerja lebih banyak dan lebih produktif. Penyerapan tenaga kerja dalam pertumbuhan yang berkualitas seperti ini jauh lebih baik, terutama dari segi pendapatan dan kesejahteraan.

Tidak seperti sekarang kualitas pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja lebih tidak berkualitas, karena ada pergeseran kegiatan ekonomi formal ke ekonomi informal. Kenyataan ini menandakan adanya kekosongan kebijakan pemerintah atau kebijakan yang ada tidak efektif pada beberapa sektor.

Kelima, perhatian pemerintah terhadap infrastruktur ekonomi pada saat ini tidak terwujud pada implementasi, sehingga ekonomi bergerak di atas infrastruktur yang lemah, lamban, dan tidak cukup memadai. Selama beberapa tahun pemerintahan ini berjalan titik lemahnya terletak pada kebijakan pembangunan infrastruktur yang belum optimal.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

PROGRAM BLT

Mensos Akui Masih Ada Kelemahan, tapi Lebih Baik Dibanding 2005

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah mengakui bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin tahap pertama di 10 kota besar di Indonesia masih terdapat berbagai kelemahan. Namun, secara umum pembagian dana *cash* sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan (Juni, Juli, Agustus) per keluarga miskin berjalan jauh lebih tertib dibanding pembagian BLT 2005.

Kelemahannya, menurut Bachtiar Chamsyah, antara lain masih terdapat kartu BLT yang salah nama dan alamat penerima, warga miskin yang sudah meninggal dunia dan pindah alamat namun masih terdaftar sebagai penerima

kartu BLT. Ini karena masih menggunakan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2005. Padahal, keluarga miskin yang berhak menerima BLT bertambah.

"Uang yang digelontorkan pemerintah untuk membantu keluarga miskin jumlahnya sangat besar, cakupan wilayahnya luas, sehingga tak mungkin 100 persen mulus. Saya kira wajar masih ada masalah. Tetapi pemerintah terus berupaya untuk melakukan verifikasi sehingga mereka yang belum menerima BLT tahap pertama bisa diberikan pada tahap kedua," ujar Bachtiar Chamsyah ketika meninjau pelaksanaan pembagian BLT di Kantor Pos Jalan Pemuda No 7 Rawa-

mangun, Jaktim, Sabtu (24/5).

Mensos menilai keluarga miskin sangat antusias menerima BLT. Sebab, dalam kondisi ekonomi sulit, kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) sekarang ini, uang Rp 300 ribu sangat bermanfaat bagi mereka. Antusias itu terlihat di hari pertama, Sabtu (24/5). Padahal, kartu BLT itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil uang di kantor pos hingga Desember mendatang.

"Saya tanya kepada warga miskin, seorang ibu yang sudah tua, yang memperoleh dana BLT, mengaku berterima kasih kepada pemerintah. Anahnya kok ada pemerintah daerah yang menolak, menghalang-halangi warganya yang miskin

"Uang yang digelontorkan pemerintah untuk membantu keluarga miskin jumlahnya sangat besar, cakupan wilayahnya luas, sehingga tak mungkin 100 persen mulus. Saya kira wajar masih ada masalah."

Bachtiar Chamsyah
Menteri Sosial

menerima BLT, dana itu hak mereka yang tidak mampu," kata Bachtiar. Mensos meminta seluruh aparat di daerah harus patuh terhadap program

nasional ini. Dalam waktu dekat, BPS dan Departemen Sosial akan melakukan verifikasi data penerima BLT di 1.000 kecamatan.

Sekjen Depsos Ghazali Situmorang menambahkan, guna meringankan beban ekonomi warga miskin, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah telah meluncurkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Program itu antara lain subsidi beras untuk rakyat miskin (*raskin*) yang harganya murah, minyak goreng murah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pemberian kredit usaha melalui bank pemerintah. "Jadi, tak

hanya program BLT," katanya. Pembagian dana BLT tahap pertama dilakukan di 10 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Kupang.

Warga miskin di Jakarta dan kota besar lainnya khawatir tak mendapatkan dana BLT tersebut sehingga mereka bersemangat menyerbu kantor pos pada hari pertama. Padahal, menurut Deputi Operasi Wilayah Usaha Pos Jabodetabek dan Banten Bambang Suherman, masyarakat tidak perlu berdesak-desakan karena setiap hari kantor pos menyediakan loket khusus yang melayani warga miskin untuk mengambil uang dana BLT.

Nurhana (61), janda miskin warga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, menyatakan berterima kasih memperoleh dana BLT. Namun ia merasa tidak enak karena tetangganya yang juga miskin belum menerima BLT.

Plh Wali Kota Jakarta Timur Terman Siregar, yang juga meninjau pembagian dana BLT di Kantor Pos Jalan Pemuda, menegaskan, jumlah keluarga miskin (*gakin*) di Jakarta Timur sesuai survei BPS 2005, yang berhak menerima BLT sebanyak 38.871 jiwa, namun setelah diverifikasi, ternyata berkurang 1.224 jiwa, sehingga hanya 37.647 jiwa yang menerima dana BLT tahap pertama.

(Yon Parjiyono)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> O
---	---

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
---	---	--

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : ↓												TAHUN 2008																		

KENAIKAN BBM

Pemerintah Harus Konsisten Jaga Stabilitas Harga

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah didesak untuk konsisten menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 28,7 persen. Sebelumnya, harga kebutuhan pokok telah mengalami kenaikan akibat gejolak harga pangan dunia serta akibat spekulasi rencana kenaikan harga BBM. Kini harga kebutuhan pokok itu sudah merangkak naik lagi akibat kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok itu semakin sulit dijangkau sebagian besar masyarakat yang tergolong kelas menengah ke bawah.

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin menje-

laskan, kenaikan harga akibat wacana kenaikan harga BBM sudah terjadi secara perlahan-lahan dalam tiga pekan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan ulah kalangan produsen distributor dan pedagang bahan pokok yang kembali menaikkan harga. Ini karena mereka juga berharap mendapat keuntungan lebih akibat meningkatnya biaya produksi dan operasional.

"Menjaga tidak ada kenaikan berbagai harga tidak mungkin bisa dilakukan, pemerintah hanya bisa meredam gejolak harga saja. Gejolak akibat kenaikan harga BBM bisa terjadi selama satu sampai tiga bulan atau sampai Agustus. Belum lagi faktanya pada bulan Juli juga mengalami siklus kenaikan

tahunan, karena musim panen baru selesai dan stok bahan pokok pada kondisi kritis," kata Bustanul kepada *Suara Karya* di Jakarta, Minggu (25/5).

Lonjakan harga kebutuhan pokok, lanjut dia, juga akan terjadi pada bulan Juni mendatang, karena pemerintah dan Organda memutuskan kenaikan tarif transportasi secara resmi. Ini diperparah dengan kenyataan bahwa memasuki tahun ajaran baru pada Juli dan menjelang bulan Ramadan juga bakal terjadinya lonjakan harga berbagai bahan pokok dan komoditas strategis lainnya.

"**J**adi karena kita hanya bisa meredam saja, maka stok barang-barang dan harga bahan pokok tidak boleh kosong," katanya.

Di sisi lain, Bustanul juga menyinggung krisis pangan dunia akan terus berlangsung sampai akhir tahun 2008 sehingga sejumlah komoditas impor akan terus mengalami lonjakan harga di dalam negeri. "Terkait komoditas impor seperti kedelai, jagung, dan lainnya masih bergejolak," ujar Bustanul.

Diakuinya, kondisi gejolak harga bahan pokok saat ini lebih terasa berat karena berhubungan dengan harga BBM yang baru dinaikkan. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi agar gejolak harga tidak semakin menyulitkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhidin M Said juga mengingatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait harus segera memutuskan besaran biaya transportasi yang berlaku untuk angkutan umum dan barang. "Kenaikan atau perubahan tarif transportasi jangan mengambang supaya harga-harga komoditas pokok

dan barang-barang terkendali," ujar Muhidin.

Menurut dia, bila sarana transportasi sudah bisa diatasi dan distribusi barang berjalan lancar, kekhawatiran bakal terjadinya lonjakan harga-harga sudah bisa diminimalisasi dengan baik. "Jadi kenaikan ongkos transportasi harus dalam batasan yang wajar, tidak lebih dari 10 persen saja. Ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat juga menjadi kunci meredam gejolak harga kembali pascakenaikan harga BBM ini," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meyakini dampak kenaikan harga BBM terhadap harga bahan-bahan pokok tidak akan terlalu besar. "Paling-paling harga bahan pokok naik sedikit," kata Wapres.

Berdasarkan pantauan, di sejumlah daerah, harga bahan-bahan pokok mulai merangkak naik. Harga beras di Kabupaten Lebak, Banten, misalnya, melambung menyusul kenaikan harga BBM. Ini menyebabkan omzet penjualan pedagang di pasar menurun drastis hingga 70 persen. Beberapa pedagang

beras di pasar Rangkasbitung mengeluhkan kenaikan antara Rp 600-Rp 1.000 per kilogram.

Harga beras medium ukuran kelas super yang semula Rp 4.500 per kg naik menjadi Rp 5.500 per kg, beras medium ukuran menengah Rp 3.700 per kg menjadi Rp 4.700 per kg, dan beras ukuran kelas tiga semula Rp 3.400 per kg naik menjadi Rp 4.000 per kg. "Melonjaknya harga beras itu akibat terhambatnya pasokan menyusul terjadi kenaikan harga BBM," kata H Ujang (45), pedagang beras di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Menurut dia, dalam dua hari setelah kenaikan harga BBM hingga kini sepi pembeli, sehingga lebih banyak menunggu dan duduk. Bahkan, omzet pendapatan juga menurun hingga mencapai 70 persen dibanding harga normal beberapa hari lalu. Sebetulnya kenaikan itu disebabkan petani menunggu menjual ke penggilingan padi sehingga pasokan beras ke pasar tersendat. "Kemungkinan mereka menjual setelah kenaikan harga BBM itu," katanya.

Sedangkan di Palembang, harga sejumlah kebutuhan

pokok di beberapa pasar tradisional Palembang, sejak Sabtu (24/5) hingga Minggu (25/5) mulai bergerak naik dibanding beberapa hari sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM. "Beberapa kebutuhan pokok seperti beras kemasan, gula pasir dan minyak goreng harga tebus di tingkat distributor mulai naik, sehingga kami terpaksa menyesuaikan harga jual ke konsumen," kata Ny Akim, pedagang di Pasar 7 Ulu Palembang.

Menurut dia, beras kemasan kantong plastik isi 20 kilogram berbagai merek rata-rata naik Rp 2.000 per karung, seperti merek kapal layar dari Rp 101.000 kini menjadi Rp 103.000 per karung, dan merek Ikan Mas dari Rp 97.000 menjadi Rp 99.000 per karung.

Selain beras, kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan antara lain gula pasir dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.200 per kg, minyak goreng curah dari Rp 10.700 menjadi Rp 10.900 per kg. Harga beras yang dijual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga naik dibanding pekan lalu.

(Abdul Choir/Andrian)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008

Kenaikan harga BBM tambah inflasi 1%

JAKARTA: Kepala ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan kenaikan harga BBM dalam negeri 28,7% hanya meningkatkan inflasi sekitar 1% pada putaran pertama dampak perubahan harga itu.

"Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan dampak lanjutan dari kebijakan kenaikan harga BBM pada putaran kedua," katanya, kemarin.

Dia menjelaskan pada 2005, dampak lanjutan kenaikan harga BBM terjadi dua kali. Jika ditambahkan dengan dampak inflasi putaran kedua, Sunarsip menuturkan kebijakan kenaikan harga BBM sebesar 28,7% dapat menambah inflasi 3%. (BISNIS/ESU)

102

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Demo BBM Makin Memanas

JAKARTA (SINDO)—Aksi demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin memanas kemarin.

Bentrokan antara mahasiswa dan aparat tak terhindarkan di berbagai daerah. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa Universitas Nasional (Unas) di kampusnya di Pejaten, Jakarta Selatan, sejak Jumat (23/5) malam hingga kemarin pagi berakhir ricuh.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, 15 mahasiswa dan empat aparat kepolisian terluka akibat lemparan batu dan benda keras lain. Ratusan mahasiswa Unas yang terlibat bentrokan saat ini masih ditahan di Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Selatan.

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Unas Abdul Malik menceritakan, peristiwa ini bermula ketika puluhan mahasiswa pada Jumat (23/5) malam pukul 21.00 WIB berdemonstrasi di dalam kampus. Mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Setengah jam kemudian, polisi dalam jumlah besar melakukan penjagaan di luar gerbang kampus. Entah siapa yang memprovokasi, bentrokan pun terjadi.

Malik melanjutkan, insiden ini tidak berlangsung lama. Bahkan, pada pukul 00.00 WIB, kerumunan mahasiswa sudah tidak ada. Mereka kembali masuk ke kampus. Ketika itu, Malik belum dapat memastikan apakah ada mahasiswa yang terluka.

Kegaduhan tiba-tiba terjadi di sekitar kampus pada Sabtu (24/5) pukul 05.00 WIB. Ratusan polisi merangsek masuk ke dalam kampus. Bahkan, kabarnya ada petugas yang melontarkan kata-kata kasar terhadap petugas satuan pengamanan kampus dan mahasiswa. "Saya juga tidak mengerti, kenapa tiba-tiba polisi menyerang. Padahal saat itu suasana sangat kondusif. Mahasiswa juga sedang beristirahat," tutur Malik.

Bentrokan pun kembali berlanjut dan mengakibatkan berbagai fasilitas kampus seperti anjungan tunai mandiri (ATM), gedung rektorat, laboratorium pariwisata, koperasi mahasiswa rusak.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, sebanyak 148 pengunjuk rasa ditangkap karena diduga melakukan tindakan anarki. Saat ini, kata dia, mereka berada di Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

Dia membantah bahwa polisi menyerbu Kampus Unas. "Tidak ada polisi menyerang kampus. Polisi menangkap pelaku anarki yang lari ke dalam kampus," bantahnya.

Di Yogyakarta, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Sleman. Bentrokan dipicu aksi saling dorong saat mahasiswa mencoba untuk memasuki kompleks Museum Jogja Kembali.

Mahasiswa berniat menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang siang itu dijadwalkan menjadi pembicara dalam seminar yang digelar di dalam museum tersebut.

Bentrokan terjadi di pintu masuk sisi sebelah timur. Dalam aksi saling dorong ini peserta aksi tidak mampu menandingi kekuatan aparat. Beberapa mahasiswa mengaku sempat dipukul dan akhirnya mendapatkan perawatan.

"Kami tetap akan mencoba agar bisa menyampaikan

kan aspirasi. Kita hanya akan meminta pencabutan kebijakan kenaikan harga BBM karena itu merupakan upaya untuk pemiskinan rakyat," tandas koordinator aksi AMY Andre Moerhan.

Di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Massa sempat memblokade jalur pantai utara (pantura) Jawa hingga menyebabkan kemacetan sekitar satu jam. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencabut kebijakan menaikkan harga BBM.

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM jugame-manas di Jawa Timur. Empat pengunjuk rasa ditangkap petugas Polresta Surabaya Selatan karena membakar gambar Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam aksinya di depan Gedung Graha di Surabaya kemarin. Mereka Didik Setyabudi, 26, mahasiswa IAIN

Sunan Ampel; Ranga Bisma, 19, mahasiswa Fisip Unair; Sigit Purba, 29, aktivis buruh warga Wonorejo; dan Ishari Putra, 20, mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya.

Keempat orang itu bersama anggota Front Perjuangan Rakyat (FPR) lainnya menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. Penangkapan berawal dari keinginan massa aksi untuk membakar ban bekas dan poster bergambar SBY-Kalla. Aksi tersebut sebenarnya disiapkan sebagai puncak unjuk rasa. Rencana itu sudah sempat dilarang polisi, tapi massa tetap nekat.

Saat massa aksi akan membakar poster bergambar SBY-Kalla, tiba-tiba polisi membubarkan aksi. Baku hantam tak terelakkan. Polisi menerjang ke tengah kerumunan pendemo dan menyeret mereka yang membakar gambar SBY-Kalla.

Kapolresta Surabaya Selatan AKBP Lakoni menyatakan, para peserta unjuk rasa sebenarnya telah diingatkan agar tidak merusak simbol-simbol negara. "Di antaranya

membakar foto Presiden SBY. Kita sebenarnya sudah menghalang-halangi, tapi mereka tidak menggubrisnya dan tetap melakukan hal itu. Terpaksa mereka harus kita amankan," papar Lakoni kemarin.

Di Makassar, sehari setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM, puluhan aktivis mahasiswa berunjuk rasa di depan kampus Universitas Islam Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea. Pengunjuk rasa bahkan nekat menyandera satu unit truk pengangkut BBM yang melintas sekitar lokasi aksi sekitar pukul 10.00 WITA.

DPR Sesalkan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono menyesalkan aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa Unas. "Saya sangat prihatin. Polisi harus bertanggung jawab," tandasnya.

Apalagi, lanjut Agung, polisi sampai merusak fasilitas kampus. Menurutnya, semes-

tinya polisi menggunakan cara-cara yang baik seperti berdialog. "Jangan menggunakan senjata. *Kan* mahasiswa menggunakan pikiran," tandasnya.

Sementara itu, Presiden SBY menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Sutanto dan Panglima TNI Djoko Santoso untuk mengangani aksi unjuk rasa secara arif dan tidak melalui kekerasan.

"Tetapi para pendemo itu tetap harus mengikuti undang-undang karena aksi unjuk rasa tidak bisa dilakukan malam hari," ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Andi menjelaskan, wilayah kampus juga merupakan wilayah teritorial Republik Indonesia sehingga aparat negara juga memiliki kewenangan memasukinya. Menurutnya, bila terjadi pelanggaran di kampus, aparat negara tetap harus melakukan pengamanan. "Itu jelas undang-undang mengaturnya begitu. Di istana juga

begitu, silakan demo, tapi kalau sudah gelap, silakan bubar. Boleh demo lagi besok paginya," kata Andi.

Sementara itu, dalam pidatonya pada acara peringatan Tri Suci Waisak Tahun 2552 yang diselenggarakan Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin, Presiden SBY mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memahami kondisi perekonomian dengan semangat tanpa menyerah.

Presiden kembali menjelaskan bahwa pemerintah dengan sangat berat hati terpaksa mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. Langkah itu, menurut Presiden, juga dilakukan guna mempertahankan ekonomis nasional di tengah krisis perekonomian global. "Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memahami kondisi ini dengan semangat tanpa menyerah, dengan tegar dan tabah," tuturnya.

Presiden juga meminta seluruh masyarakat untuk

menjauhkan diri dari sikap pandai mengeluh.

"Jangan justru menyebarkan informasi yang sesat kepada masyarakat serta jadi penonton tanpa memberikan solusi yang nyata," ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat untuk tidak ikut berdemonstrasi lantaran pemerintah telah mengambil keputusan secara komprehensif terkait kenaikan harga BBM.

Dia mengaku berang melihat aksi anarkistis mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM. Menurutnya, tindakan anarkistis bukan bagian dari demokrasi. "Siapa yang menutup atau menghalangi jalan, tangkap! Karena demokrasi tidak menutup jalan," tandasnya.

Dia mengatakan, pemerintah membolehkan aksi unjuk rasa asalkan dilakukan secara damai. Namun, jika sudah dilakukan melalui tindakan anarkistis, aparat kepolisian harus menindaknya.

(TIM SINDO)



BERAKHIR BENTROK

Aparat Polresta Surabaya Selatan menendang seorang mahasiswa di depan Gedung Graha di Surabaya, kemarin. Polisi menangkap empat pengunjung rasa dalam aksi menolak kenaikan harga BBM itu.

SEMAKIN MELUAS

PALEMBANG:

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak BBM berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

MAKASSAR

Puluhan aktivis mahasiswa berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di depan kampus Universitas Islam Makassar. Pengunjuk rasa menyandera satu unit truk pengangkut BBM.

KENDARI

Puluhan massa dari Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari, memblokir jalan dan membakar ban mobil. Mereka menolak kenaikan BBM.

SURABAYA:

Massa berunjuk rasa di depan Gedung Graha di Surabaya. Polisi membubarkan aksi itu dan menangkap empat orang karena membakar gambar Presiden dan Wapres.

MEDAN

Bentrokan terjadi ketika polisi mencoba membubarkan demonstrasi puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

JAKARTA

Mahasiswa Unas berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Aksi itu berujung pada penyerbuan Kampus Unas oleh polisi pada Sabtu (24/5) pagi. Sebanyak 148 orang ditangkap pada peristiwa itu. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak.

BANDUNG:

Massa Hizbut Tahrir berunjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Bandung, kemarin. Aksi tersebut mendapatkan pengawasan ketat dari petugas kepolisian.

YOGYAKARTA:

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) bentrok dengan aparat Polres Sleman.



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 17

TAHUN 2008

'Bank Syariah Perlu Bidik Sektor Migas'

Sektor lain yang perlu mendapat dukungan pembiayaan adalah pertambangan.

JAKARTA — Sektor minyak dan gas bakal menjadi primadona investasinya seiring dengan kian meningkatnya harga minyak dunia. Praktisi perbankan syariah melihat peluang bisnis dari sektor migas layak dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan industri yang lebih pesat. "Saya kira bank syariah perlu membidik potensi bisnis pembiayaan di sektor migas agar industri bisa tumbuh lebih pesat," ujar *Group Sharia Head* Bank DKI, Athouf Ibnu Tama kepada *Republika*, akhir pekan lalu.

Hingga kini, harga minyak dunia terus mengalami peningkatan signifikan bahkan sempat mencatat rekor tertinggi 135 dolar AS per barel. Kenaikan tersebut, berdampak pada meningkatnya laju inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia. "Menurut saya, dalam kondisi ini, sektor yang paling diuntungkan adalah migas," katanya.

Karena itu menurut Athouf, perbankan syariah harus melihat kondisi itu sebagai peluang bisnis. Menurutnya, perbankan berbasis tanpa bunga harus mulai mendorong penyaluran pembiayaan bagi sektor migas. Namun ia menyatakan, penerapan manajemen risiko secara hati-hati dan ketat tetap harus dilakukan. Hal itu untuk memastikan penyaluran pembiayaan perbankan syariah bagi sektor ini bisa mendorong perkembangan industri.

Untuk itu, kata Athouf, calon nasabah pembiayaan harus dipilih secara selektif dan tepat. Mengenai kapasitas, Athouf meyakini, perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan bagi sektor Migas. Hanya saja, diakuinya, soal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah memang perlu ditingkatkan agar mampu mengawal seluruh proses pembiayaan dengan baik.

Bank DKI Syariah sendiri, telah menyalurkan pembiayaan bagi sektor Migas. Hingga akhir April lalu, pembiayaan divisi syariah bank DKI mencapai Rp 420 miliar. Salah satunya adalah pembiayaan pembangunan kilang gas di Indramayu dengan menggunakan akad musyarakah (kemitraan) yang berjangka waktu lima tahun. Sementara, ekuivalensi margin pembiayaan musyarakah itu sekitar delapan persen per tahun. Selain itu, unit syariah Bank DKI juga membiayai pembangunan gedung milik perusahaan Migas di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Senada dengan Athouf, *Head of HSBC Amanah*, Mahmoud Abushamma juga membenarkan pentingnya perbankan syariah mengoptimalkan pembiayaan bagi sektor migas. Selain migas, sektor lain yang perlu mendapat dukungan pembiayaan adalah sektor pertambangan. "Selain migas, sektor lain yang juga tengah mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor pertambangan," ujarnya.

Menurut Mahmoud, perbankan syariah juga perlu mendorong perbankan investasi. Dengan strategi itu, perbankan syariah bisa berkembang lebih pesat tanpa modal besar. Salah satunya bisa dilakukan dengan menjaring dana investasi Timur Tengah untuk membiayai berbagai proyek lokal.

Menurutnya, perbankan syariah perlu melakukan inovasi strategi pengembangan agar bisa tumbuh pesat dan bersaing dengan perbankan konvensional. "Saya kira perbankan syariah perlu mengembangkan bisnis yang membuat industri mampu tumbuh pesat dan mampu mengalahkan konvensional," katanya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga akhir Maret lalu, pembiayaan perbankan syariah tercatat sebesar Rp 29,629 triliun. Dari angka itu, pembiayaan bagi sektor pertambangan tercatat Rp 816,666 miliar atau sekitar 2,76 persen. Sedangkan, sektor listrik, gas, dan air tercatat Rp 99,416 miliar atau hanya 0,34 persen. ■ aru

104

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
--	--

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI GEOLOGI
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : A.15 TAHUN 2008

6 Polisi Awasi Setiap SPBU dan Locket BLT

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta menyiapkan tim khusus untuk mengamankan titik-titik rawan pas-cakenaikan harga bahan bakar minyak yang dilanjutkan dengan pembagian bantuan langsung tunai (BLT). Pada setiap titik dialokasikan enam polisi.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Winarso menyatakan titik rawan yang dijaga secara khusus yakni stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan kantor pos pembayaran BLT. "Dua petugas berseragam dan empat intel pada setiap titiknya," kata Budi kemarin.

● FERY FIRMANSYAH

106

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

TAJUK

Negara Tanpa Subsidi BBM

Subsidi masih diperlukan. Tapi, yang disubsidi bukanlah harga BBM, melainkan warga miskin. Subsidi BBM selama ini tidak semuanya kena sasaran karena yang disubsidi adalah harga. Akibatnya, kelompok yang paling banyak menikmati subsidi BBM justru rakyat yang memiliki kemampuan ekonomis cukup bagus, yakni mereka yang memiliki mobil pribadi dan rumah dengan konsumsi listrik di atas 2.100 kwh.

Inilah salah satu alasan yang memberanikan pemerintah akhir pekan lalu menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 28,7%. Tapi, langkah ini sama sekali belum menghapus subsidi. Selain rakyat miskin diberikan sejumlah kompensasi, antara lain BLT plus, agar daya belinya tidak ambruk, subsidi harga BBM pun masih ada, bahkan membesar akibat lonjakan harga minyak mentah.

Saat ini, pascakenaikan harga BBM, rata-rata subsidi masih lebih besar dibanding pascakenaikan harga BBM, 1 Oktober 2005. Waktu itu, harga BBM dinaikkan 126%, namun subsidi masih cukup besar. Ini disebabkan oleh harga minyak mentah dunia yang terus meroket.

Harga baru BBM yang berlaku sejak Sabtu (24/5) dinihari ditetapkan pemerintah berdasarkan asumsi harga minyak patokan APBN, atau dikenal dengan *Indonesian Crude Price (ICP)* sebesar US\$ 110 per dolar AS. Sedangkan harga minyak mentah saat ini sudah menembus US\$ 135 per barel atau setara US\$ 130 per barel harga ICP. Harga minyak mentah cenderung terus menguat menembus US\$ 150 per barel.

Jika kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu menjadi alasan, pemerintah bisa saja terpaksa harus menaikkan lagi harga BBM. Sebab, total subsidi BBM yang harus disihkan pemerintah sudah sangat memberatkan APBN.

Alasan menaikkan harga BBM akan semakin kuat jika faktor penyelundupan, efisiensi, dan ketidakadilan ikut menjadi pertimbangan. Sungguhpun demikian, menaikkan lagi harga BBM tahun ini bukanlah keputusan yang tepat. Dampak buruk akan jauh lebih besar dari dampak positif yang diharapkan dari kenaikan harga BBM.

Kita sepakat menghapus subsidi harga BBM. Tapi, kapan subsidi itu menjadi nol, masih perlu waktu. Penghapusan subsidi BBM yang tergesa-gesa akan menimbulkan guncangan ekonomi. Kendati seba-

gian besar BBM bersubsidi dinikmati kaum berpenghasilan lumayan, penghapusan yang terlalu cepat akan mendongkrak harga barang dan jasa. Daya beli rakyat akan anjlok. Suku bunga meningkat. Kinerja dunia usaha terganggu. Pertumbuhan ekonomi tersendat dan penyerapan tenaga kerja akan menurun.

Subsidi BBM yang masih di atas Rp 150 triliun bukanlah angka kecil. Jika Rp 15 triliun disisihkan untuk membeli gabah, daya beli petani akan terdongkrak dan nilai tukar petani meningkat. Dampak lanjutan juga akan besar jika beras itu selanjutnya diguyur ke pasar dengan harga murah. Mayoritas rakyat yang menjadi konsumen akan sangat terbantu karena membeli beras pada harga murah.

Dana subsidi BBM yang begitu besar bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, untuk membangun jalan tol, *subway* serta berbagai sistem transportasi kota, waduk, irigasi, dan sebagainya. Andaikan sejak beberapa dekade lalu subsidi BBM sudah diturunkan perlahan menuju harga pasar, berbagai jenis infrastruktur Indonesia pasti tidak kalah dengan negara maju, apalagi proyek infrastruktur itu tidak dikorupsi.

Selama pendapatan per kapita rakyat masih rendah, penduduk miskin masih perlu subsidi. Tapi, subsidi dalam bentuk uang tunai ala BLT sebaiknya hanya untuk orang jompo dan cacat. Warga miskin lainnya harus didorong untuk berkeringat sebelum mendapatkan 'sesuatu'. Lewat proyek infrastruktur, ada kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, termasuk kaum miskin. Rakyat tidak boleh dididik menjadi pengemis.

Upaya menurunkan subsidi BBM harus sejalan dengan langkah efisiensi, diversifikasi energi, serta pembasmian korupsi dan kolusi di tubuh Pertamina dan PLN. Upaya menurunkan subsidi BBM juga harus sejalan dengan peningkatan kualitas sistem angkutan umum di berbagai kota. Dengan sistem angkutan umum yang nyaman, konsumsi BBM akan berkurang.

Agar subsidi BBM bisa segera dihapus tanpa menimbulkan gejolak dan dampak negatif berarti bagi perekonomian, lapangan kerja harus diperluas dan itu berarti daya tarik iklim investasi harus ditingkatkan. Sulit mengharapkan warga hidup sehat dengan daya beli yang baik jika mereka menganggur dan kalau pun bekerja upah mereka sangat rendah. □

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td><td style="width: 10%;">FEB</td><td style="width: 10%;">MAR</td><td style="width: 10%;">APR</td><td style="width: 10%; border: 1px solid black; border-radius: 50%;">MEI</td><td style="width: 10%;">JUN</td><td style="width: 10%;">JUL</td><td style="width: 10%;">AGST</td><td style="width: 10%;">SEPT</td><td style="width: 10%;">OKT</td><td style="width: 10%;">NOV</td><td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15</td><td>16 17 18 19 20</td><td>21 22 23 24 25 26 27</td><td>28 29 30 31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31																						
HALAMAN : 4 TAHUN 2008																									

Indonesia Masih Terjajah

Penjajahan yang terjadi di Tanah Air telah berevolusi sesuai dengan zamannya. Pada saat ini penjajahan itu sudah tidak dilakukan oleh raja-raja lagi, tetapi melalui penguasaan ekonomi, sehingga membuat masyarakat menjadi lemah secara ekonomi. Sejumlah industri strategis,

misalnya, kini banyak dikuasai asing. Salah satu perusahaan tambang emas terbesar dunia yang berlokasi di Tembagapura, Papua, dikuasai PT Freeport yang sahamnya dimiliki perusahaan-perusahaan global. Begitu pula industri telekomunikasi, perbankan, dan kini Krakatau Steel yang juga sedang diincar Grup Mittal dari India. Bukan hanya industri-industri strategis yang dikuasai asing,

barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari pun adalah buatan luar. Ini sungguh menyedihkan, karena, seperti diungkapkan salah seorang pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, ternyata hampir 75% dari barang-barang yang kita konsumsi adalah produk impor. Apa sesungguhnya yang salah dengan negeri kita? Kesalahan persepsi dalam mengelola manajemen perekonomian

bangsa ini memang telah membuat masyarakat menjadi lemah, bahkan bersikap kurang perhatian terhadap aset-aset yang masih dimiliki oleh negara, seperti PLN, Krakatau Steel dan Pertamina.

Kerap muncul pandangan di kalangan para pengambil kebijakan di negara kita bahwa tidak apa-apa BUMN dijual, asal kita bisa memperoleh pendapatan dari pajak. Tidak apa-

apa menjual badan usaha milik negara (BUMN) yang penting perusahaan tersebut bisa tetap mempekerjakan rakyat. Kita selalu dicekoki esensi kapitalisme. Bahkan untuk melegalkan keberadaannya, dibuatlah berbagai peraturan dan undang-undang untuk mendukungnya.

Untunglah, di tengah kekacauan birokrasi dan manajemen perekonomian, Indonesia masih

terjamah *invisible hand*, sehingga negeri ini masih bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Kita harus bersyukur Indonesia adalah negara dengan pemimpin yang seadanya dan birokrasi yang amburadul, tapi terbukti kita masih bisa berkembang. Semua itu semata-mata karena bantuan Tuhan.

Rosi Sugiarto
Pondok TK Alfirtaus
BSB Jatisari Mijen, Semarang

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<p><input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA</p>	<p><input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/></p>										
<p>KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF</p>											
<p>JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES</p>											
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>											
<p>HALAMAN : 8</p>										<p>TAHUN 2008</p>	

Belanja Negara Baru Terserap 26,61 Persen

NERACA

Jakarta - Hingga tanggal 15 Mei 2008 pemerintah baru menyerap 26,61 persen dari total anggaran belanja negara di pagu APBN 2008 yakni Rp854,29 triliun. Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Herry Purnomo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menyebutkan, realisasi itu terdiri dari penyerapan belanja pusat sebesar 23,12 persen dari Rp311,9 triliun dan penyerapan dana transfer ke daerah sebesar 37,71 persen dari pagu anggaran Rp281,2 triliun.

Disebutkan Herry, penyerapan anggaran yang masih menggunakan pagu anggaran di APBN 2008 itu juga baru menyerap 30,02 persen belanja pemerintah pusat yang terdiri dari penyerapan belanja pegawai.

Sementara itu, realisasi bantuan sosial, belanja modal, dan barang hingga 15 Mei 2008 pun masih rendah. Menurut Herry, realisasi bantuan sosial baru 13,81 persen, belanja modal 11 persen, dan belanja barang 14,4 persen dari total belanja modal Rp95,4 triliun dan belanja barang Rp69,4 triliun.

Adapun rinciannya antara lain, selama kuartal I

2008, penyerapan belanja modal baru Rp10,49 triliun dan penyerapan belanja modal hanya Rp9,9 triliun. "Rendahnya penyerapan anggaran di lima bulan pertama di 2008 merupakan fenomena yang biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Berbeda dengan penyerapan belanja barang dan modal yang masih rendah, di sisi lain, realisasi belanja untuk pembayaran bunga utang telah mencapai 30,11 persen dari pagu anggaran Rp91,3 triliun. Begitu juga dengan belanja subsidi sebesar 37,18 persen dari anggaran Rp97,8 triliun.

Dari sisi subsidi energi (BBM dan listrik), penyalurannya sudah 47,83 persen dari Rp75,5 triliun. Artinya pemerintah sudah membayarkan subsidi Rp36,6 triliun menjelang pertengahan tahun. Patokan subsidi yang ditetapkan di APBNP 2008 sendiri membengkak menjadi Rp126,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp60,2 triliun untuk subsidi listrik.

Diungkapkan juga dana transfer ke daerah terserap 37,71 persen. Ini menunjukkan kinerja yang membaik mengingat sebelum pertengahan tahun 2008, pemerintah telah menyalurkan 41 persen

dana alokasi umum dari pagu anggaran Rp179,5 triliun.

Sedangkan realisasi dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) berturut-turut mencapai 28,99 persen dan 19,2 persen. Namun, penyerapan dana penyesuaian masih kecil, hanya 8,6 persen dari anggaran Rp6,9 triliun.

Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, pendapatan dan hibah negara telah mencapai 36,63 persen dari target Rp779,2 triliun. Pos penerimaan terbesar dari penerimaan dalam negeri sebesar 36,68 persen dari target Rp778,6 triliun, yakni dari penerimaan perpajakan 39,62 persen dan penerimaan bukan pajak 29,31 persen.

Mengenai penyerapan pembiayaan dalam negeri, pendapatan dari privatisasi BUMN masih nihil karena privatisasi baru dilakukan pada awal semester II. Sedangkan dari pengelolaan aset oleh PPA sudah mencapai 29,4 persen. Pembiayaan dari penerbitan Surat Utang Negara netto telah mencapai 44,73 persen. Namun, penarikan pinjaman luar negeri bruto hanya 14,68 persen dan itu belum dikurangi pembayaran pokok utang luar negeri yang telah terserap 26,85 persen. ● san

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 7										TAHUN 2008	

EDITORIAL

Rendah, Kredibilitas Petinggi Negara Kita

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang didahului dengan Inpres 3/2008 tentang program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran, ternyata di lapangan telah menimbulkan kontroversi baik dikalangan birokrat maupun rakyat kecil.

Pertama, banyak kepala daerah termasuk tingkat lurah yang menolak instruksi tersebut dengan dalih data BLT berdasarkan tahun 2005 kurang valid sehingga dikhawatirkan membuat masyarakat miskin yang tidak terdata akan berbuat anarkis kepada mereka.

Kedua, koordinasi dan komunikasi antarmenteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu belum mampu menjabarkan masalah teknis pencairan BLT sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di lapangan. Akibatnya, banyak warga miskin sempat kecewa saat mereka datang ke kantor pos pada tgl. 23 Mei, ternyata realisasinya diundur keesokan harinya (24 Mei).

Ketiga, penegasan Wapres Jusuf Kalla tentang kepala daerah yang menolak BLT akan diberikan sanksi terhadap mereka. Namun pernyataan ini kemudian diperhalus oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi yang tidak akan menerapkan sanksi atau pemanggilan terhadap kepala daerah yang menolak BLT tersebut. "Kita jangan jadi bangsa yang kejam dengan memberikan sanksi-sanksi," ujarnya di Depok, Minggu (25/6).

Melihat kontroversi tersebut, jelas penjelasan pemerintah terkesan tidak sinkron bahkan berjalan sendiri-sendiri seandainya tanpa memandang pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Padahal rakyat saat ini sangat menantikan dan merindukan kehadiran pemimpin sejati yang dapat menjadi payom dan mampu mensejahterakan kehidupan di negeri ini.

Di tengah-tengah kesulitan itu, sesungguhnya para pemimpin justru diuji kualitasnya, baik secara moral, intelektual, maupun manajerialnya, sehingga rakyat pada saatnya akan mempunyai penilaian yang tepat untuk memilihnya di kemudian hari.

Kita melihat kalkulasi dan pertimbangan yang diambil oleh pemerintah senantiasa menggunakan pendekatan dan pola pikir pengusaha (pedagang), bukan sebagai seorang negarawan, yaitu sangat praktis, pragmatis, mengedepankan efisiensi, dan menghindari kerugian, sehingga sangat matematis sekali; padahal sesungguhnya negara ini bukanlah perusahaan besar sehingga perlu ada pertimbangan lain, yaitu kesejahteraan rakyat yang paling pertama dan utama.

Bukankah negara dan pemerintah didirikan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945? Karena itu, apa pun kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat—khususnya yang kecil dan miskin—harus tidak kita dukung, sebab bertentangan dengan tujuan kita bernegara dan berbangsa.

Kita salut kepada pemikiran ekonom Kwik Kian Gie, mantan menteri, yang dengan tegas menyatakan pilihan terbaik pemerintah saat ini adalah, batalkan atau setidaknya tidaknya tanggguhkan kenaikan harga BBM, sebab 37 juta rakyat miskin sudah dalam kondisi yang sulit dan tidak berdaya.

Pemerintah seyogianya tidak perlu panik menghadapi fluktuasi harga minyak dunia, tetapi berpikir tenang dan jernih, menyelesaikan semua persoalan satu persatu. Bagaimana hasil evaluasi dari kenaikan BBM Oktober 2005 dan konversi minyak tanah ke gas yang sedang berlangsung? Apakah sudah sesuai dengan sasaran dan target atau belum, serta apakah sudah memberikan hasil yang signifikan melalui BLT serta pemberian kompor gas gratis kepada rakyat atau tidak?

Persoalan lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah, BLT yang merupakan sebuah terapi untuk menyejahterakan rakyat, ternyata tidak memberikan pendidikan yang baik; sebab sesungguhnya di saat bangsa ini menghadapi kesulitan, justru kemandirian dan ketegaranlah yang harus ditumbuhkan dengan pemberian contoh oleh para pemimpin bangsanya.●

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Harga BBM, Korupsi dan Moral Politikus

Oleh : AP Batubara
Preskom PT Wiraswasta Gemilang Indonesia

Seharusnya pemerintah tidak buru-buru menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena 'banyak jalan menuju Roma'. Masih banyak alternatif kebijakan lain yang bisa dilakukan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla untuk mengatasi bobolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menggenjot pajak. Selama ini pemasukan dari sektor pajak masih belum maksimal. Masih banyak anggota masyarakat yang belum membayar pajak secara benar. Para pengusaha harus malu kalau tidak membayar pajak secara benar.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah menunda proyek-proyek yang tidak terlalu penting.

Kebijakan pemerintah di sektor energi memang sudah salah sejak lama, terutama di jaman orde baru. Hasilnya, pemerintah harus selalu memberikan subsidi yang amat besar. Dalam penyediaan listrik misalnya. Pemerintah saat itu membangun Pembangkit Listrik di Suralaya, ujung barat Pulau Jawa. Padahal batubara sebagai sumber bahan baku pembangkit didatangkan dari Sumatera. Akibatnya ongkos mengangkut batubara sudah bisa untuk membangun pembangkit listrik sendiri.

Seharusnya berbagai kebijakan pemerintah di sektor energi yang salah bisa dibenahi oleh pemerintah. Tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang sekarang tidak bisa melakukan itu. Harusnya, dengan berbagai masalah di sektor energi yang tidak tertangani secara baik oleh Purnomo Yusgiantoro selaku penanggung jawab masalah energi, terutama terkait dengan kenaikan BBM, Purnomo sudah harus dicopot dari jabatannya. Selama ini, kerja Purnomo hanya 'ngumpulin' duit aja.

Masalah di negara ini memang amat banyak. Tapi semuanya bersumber pada tidak adanya moral yang baik. Baik politikus di lembaga legislatif, maupun para eksekutif. Kalau seorang wakil rakyat sudah tidak bermoral, apalagi yang bisa diharapkan dari mereka.

Bagaimana cara mengukur wakil rakyat tidak bermoral. Gampang saja. Kalau dia korupsi, atau membantu terjadinya korupsi, maka dia tidak boleh lagi menjadi wakil rakyat atau pejabat.

Sebagai pejabat atau wakil rakyat di lembaga legislatif, *income* mereka sudah amat cukup. Tapi kalau ternyata itu masih kurang, berarti ada yang salah dalam manajemen pengelolaan keuangan mereka.

Sayang memang, saat kita memperingati seratus tahun kebangkitan nasional, Indonesia masih belum maju seperti yang diinginkan. Lantaran banyak orang sudah tidak memiliki moral baik dan melakukan korupsi. Susahnya, orang bangga memiliki rumah mewah walau diperoleh dari hasil korupsi.

Itu sebabnya, para pejabat harus teken kontrak dengan rakyat. Kalau dia melanggar kontraknya, misalnya korupsi, maka dia harus mundur. Tak perlu cari-cari alasan atau menunggu keputusan pembuktian di pengadilan.

Bagi kalangan pengusaha, dalam kondisi sulit seperti ini, pengusaha jangan lagi memikirkan diri sendiri. Pengusaha harus membuat perusahaannya kuat hanya demi membuat karyawannya makmur. Pengusaha tak perlu kaya, tapi perusahaannya harus kaya. Kalau perusahaan kaya, maka perusahaan akan kuat dan bisa menambah jumlah karyawan sehingga ada penyerapan tenaga kerja baru. ●

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>														
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td><td style="width: 10%;">FEB</td><td style="width: 10%;">MAR</td><td style="width: 10%;">APR</td><td style="width: 10%; text-align: center;">MEI</td><td style="width: 10%;">JUN</td><td style="width: 10%;">JUL</td><td style="width: 10%;">AGST</td><td style="width: 10%;">SEPT</td><td style="width: 10%;">OKT</td><td style="width: 10%;">NOV</td><td style="width: 10%;">DES</td></tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15</td><td>16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td></tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
HALAMAN : 2 TAHUN 2008															

KSPSI Serukan Demo Nasional Soal BBM

JAKARTA—Penolakan harga bahan bakar minyak (BBM) masih berlanjut. Komponen organisasi keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melancarkan demo nasional pada 26 Mei ini untuk menentang kebijakan tersebut.

Seruan demo nasional kepada seluruh elemen KSPSI dari pusat sampai daerah itu dituangkan melalui instruksi Ketua Umum DPP KSPSI, Jacob Nuwa Wea. Di Jakarta, demo akan berpusat di Istana Negara dengan mengerahkan massa dari kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.

Sedangkan, di daerah-daerah, demo akan dilakukan di kantor gubernur, bupati, dan wali kota. KSPSI menjanjikan demo akan dilakukan secara tertib, damai, dan tidak anarkis.

"Selain menolak kenaikan harga BBM, KSPSI juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga sembilan bahan pokok," kata Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, Mathius Taming, akhir pekan lalu.

Kenaikan harga BBM dinilai akan sangat merugikan buruh dan menyebabkan rakyat makin sengsara. Sebelum kenaikan harga BBM saja, semua harga kebutuhan pokok sudah naik. Terbukti, setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, harga akan naik lagi.

KSPSI meminta pemerintah mencari alternatif terbaik untuk menyelamatkan APBN. "Namun, kalau pemerintah

tetap memaksakan kenaikan harga BBM, KSPSI akan melakukan mogok nasional," kata Mathius.

Tentang melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, ia menyesalkan pemerintah yang tidak bisa mengendalikannya. Mathius juga mengecam pernyataan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang justru menilai harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil.

"Berarti, menteri tidak tanggap terhadap keluhan rakyat. Atau, dia hanya mendapat laporan ABS (asal bapak senang) dari stafnya. Sebagai menteri perdagangan, mestinya turun ke pasar, mencari penyebab, dan berusaha menekan kenaikan harga," ujar Mathius.

KSPSI juga tidak setuju dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pemerintah kepada rakyat miskin. "Program BLT sangat tidak mendidik karena akan menyebabkan konflik sosial. Apalagi, data yang dipakai sekarang tidak valid karena menggunakan data tahun 2005," sambungnya.

Diingatkan, dalam pembagian BLT nanti, pasti akan terjadi keributan karena banyak masyarakat yang merasa berhak menerima, tapi kenyataannya tidak mendapatkannya. Belum lagi, kalau sistemnya tidak terencana dengan baik, pasti akan jatuh korban seperti yang terjadi pada 2005. ■ ant

113



MOHAMAD FINAL DAENG

Kondisi Jalan Raya Porong yang diblokade warga Siring Barat, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (24/5). Warga menuntut mereka segera diberi ganti rugi setelah muncul banyak semburan air bercampur gas dan rumah yang retak-retak di desa mereka akibat pengaruh semburan lumpur Lapindo.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.11

TAHUN 2008

Bantuan Langsung Tunai

Kita sama-sama mengetahui bahwa bantuan langsung tunai (BLT) Plus merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin akibat akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM). Saya menilai BLT Plus yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin ibarat memberikan permen kepada anak kecil yang sedang merengek.

BLT Plus merupakan strategi pemerintah untuk membujuk masyarakat, khususnya masyarakat miskin, supaya jangan ada gejolak dengan rencana dinaikkannya harga BBM. Dengan kata lain, BLT Plus hanya untuk mengantisipasi gejolak yang akan timbul dalam masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

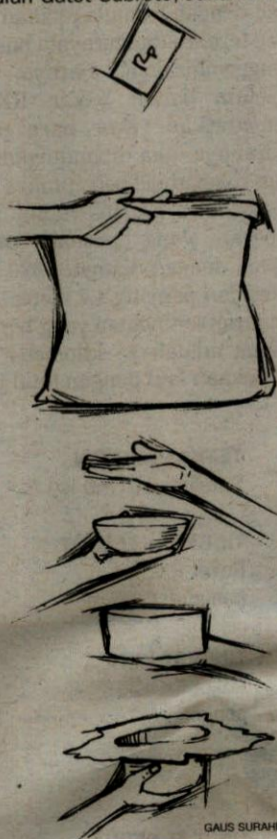
Pemberian BLT Plus kepada masyarakat miskin bukanlah solusi yang bijak untuk meminimalisasi angka kemiskinan. Hal ini hanya merupakan kesenangan sesaat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Ibarat setelah permen itu habis dimakan, maka kondisi akan seperti semula lagi, sang anak akan merengek untuk meminta permen lagi. Jadi, BLT Plus tidak mengajarkan masyarakat untuk berusaha mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan.

Kondisi ini akan membuat masyarakat tidak mandiri, bahkan akan tetap cenderung menjadi pengemis yang akan selalu memohon belas kasihan pemerintah. Pengalaman pemberian BLT pada 2005 sebenarnya harus menjadi patokan. Hal ter-

sebut tidak dapat menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu saya mengimbau kepada pemerintah lebih baik dan sangat bijak apabila anggaran yang disediakan untuk BLT Plus tersebut digunakan untuk subsidi BBM dan pemberdayaan masyarakat yang tergolong miskin.

Richard Sahetapy

Staf Indonesian Working Group
on Forest Finance
Gd. Manggala Wanabakti
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat



GALUS SURAHMAN (TEMPO)

Pengalaman pemberian BLT pada 2005 sebenarnya harus menjadi patokan. Hal tersebut tidak dapat menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu saya mengimbau kepada pemerintah, lebih baik dan sangat bijak apabila anggaran yang disediakan untuk BLT Plus digunakan untuk subsidi BBM dan pemberdayaan masyarakat yang tergolong miskin.

Richard Sahetapy

Staf Indonesian Working Group on Forest Finance
Gd. Manggala Wanabakti
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 11	
TAHUN 2008	

Penyaluran BLT Hari Pertama Lancar

JAKARTA (SINDO) - Pencairan dana bantuan langsung tunai (BLT) hari pertama, kemarin, di sejumlah kantor pos di 10 kota di Tanah Air secara umum berlangsung lancar. Namun sejumlah protes dari warga masih muncul.

Di lima wilayah di Jakarta, ratusan rumah tangga sasaran (RTS) yang merupakan warga miskin tampak tertib menunggu pencairan BLT. Di kantor pusat PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat, misalnya, penyaluran BLT bagi RTS yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB berlangsung tertib.

Pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Menurut Ical—sapaan Aburizal—,

penyaluran dana BLT kali ini berlangsung lancar bila dibandingkan 2005 lalu. Selain dilengkapi fasilitas memadai, penyalurannya juga dilakukan secara sistematis. "Saya bersyukur, secara keseluruhan penyaluran bantuan ini berjalan lancar dan tidak menemui kendala," katanya.

Tarwiyah, 64, salah seorang warga Kebon Kelapa RT08/01 Jakarta Pusat mengaku senang mendapatkan dana BLT. Menurut dia, meski uang yang diperolehnya tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehari-hari, uang itu bisa digunakan untuk menambah modal dagang. "Kalau dibilang cukup ya tidak cukup, tapi uang ini akan saya gunakan untuk menambah modal," ucapnya.

Di tempat terpisah, Men-

teri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah mengungkapkan penyaluran BLT hari pertama kemarin berlangsung lancar. Dia meyakini tahun ini penerima BLT tepat sasaran hingga 99%.

"Sekarang masih dikalkulasi. Mengingat pengalaman tahun 2005 lalu, menurut penelitian dari 56 perguruan tinggi, BLT tepat sasaran hingga 97%. Sekarang kita optimistis bisa sampai 99%," kata Bachtiar saat meninjau penyaluran BLT di Kantor Pos Jalan Pemuda, Jakarta Timur, kemarin.

Bachtiar mengimbau agar warga tidak serentak mengambil uang BLT di hari-hari pertama. Karena, dana BLT tetap tersedia hingga 31 Desember 2008. "Jadi jangan takut. Kalau tidak mengambil di hari pertama tidak

akan hangus. Besoknya boleh," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial (Depsos) Chazali Situmorang mengungkapkan, pemerintah hingga saat ini telah mencairkan dana untuk BLT sebesar Rp4,1 triliun. Jumlah tersebut dapat mencakup 13 juta rumah tangga miskin (RTM) dari total 19,1 juta yang direncanakan.

Chazali menjelaskan, apabila di sebuah desa penerima BLT terdahulu telah meninggal, dia dapat diganti dengan RTM lain yang akan diputuskan melalui rembuk desa. "Mereka para kepala desa, tokoh masyarakat, dewan kelurahan atau karang taruna berembuk untuk memutuskan keluarga mana yang akan diberi BLT," paparnya.

Namun, penyalurannya

memang agak lama sekitar seminggu sampai dua minggu karena mengganti kartu baru lagi. "Itu kalau di desa. Namun, kalau di DKI Jakarta, kebijakannya kalau orangnya meninggal tidak bisa diganti, langsung hangus," terangnya.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berterima kasih karena pencairan BLT berjalan lancar. "Terima kasih kepada semua pihak, terutama kantor pos, karena penyaluran BLT berjalan efisien, masyarakat pun disiplin," kata Wapres sesuai meninjau penyaluran BLT di dua kantor pos Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) itu, Wapres didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Di Kantor Pos Sumur Batu, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Kantor Pos Serdang, Ke-

mayoran, Jakarta Pusat, Kalla menyempatkan berdialog dengan masyarakat yang menerima BLT.

Kalla menegaskan selama ini subsidi masih banyak dinikmati masyarakat yang mampu. Karena itu, pemerintah akan mengurangi dan mengalihkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Lihatlah, masyarakat senang dengan BLT," kata Kalla kepada wartawan.

Seperti diketahui, BLT mulai disalurkan kemarin secara serentak di 10 kota sasaran, salah satunya Jakarta. Penyaluran BLT ini dilakukan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Jumat (23/5).

Sasaran BLT tahap pertama adalah Kota Palembang, Medan, Jakarta, Ban-

dung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Makassar, dan Banjarmasin.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono meminta rekan-rekannya di DPR membentuk tim pengawas BLT. Tujuannya agar penyaluran BLT yang dimulai kemarin tepat sasaran. "Saya telah usulkan kepada rekan-rekan di DPR, baik komisi maupun gabungan, untuk membuat tim pengawas BLT," ujar Agung sesuai memberikan pidato ilmiah pada wisuda mahasiswa Universitas Nasional (Unas) di Balai Sudirman, Jakarta, kemarin.

(adam p/chamad h/
sucipto/neneng z/arif dc/
rendra h/arif b/susilo h/
soeprayitno/yenny h/yugi p/
m syahyan)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

KENAIKAN BBM

Nasib Nelayan di Ujung Tanduk

CILACAP (MI): Kehidupan nelayan makin terpuruk, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Para pemilik kapal di Cilacap, Jawa Tengah, yang memiliki tidak kurang dari 300 kapal dengan bobot 35 *gross ton* dibayangi kerugian yang akan membuat mereka gulung tikar.

Pasalnya, modal melaut mengalami kenaikan hingga 40%-50%, di atas kenaikan harga BBM. Harga peralatan yang harus mereka beli, saat ini juga sudah ikut naik.

"Sebelum BBM naik, dalam satu bulan, kapal 35 GT butuh dana Rp40 juta-Rp50 juta. Sekarang, butuh modal Rp80 juta," papar Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal Cilacap, Sanpo, kemarin.

Kebutuhan kapal 60 GT lebih besar mencapai Rp125, dan kini melonjak Rp250 juta.

Kalau penambahan modal ini tidak diikuti kenaikan harga ikan dan udang, gulung tikar tinggal menghitung hari. Tragisnya, dari setiap kapal, hidup 10 pekerjanya sangat tergantung hasil tangkapan.

Tidak hanya pengusaha kapal dan anak buahnya yang menderita. Nelayan kecil sudah lebih dulu menganggur.

Arjadi, 42, nelayan asal Desa Lengkong, Kecamatan Cilacap Selatan, tidak lagi berani me-

laut. "Harga solar Rp5.500 per liter, tidak mungkin kami beli. Karena itu, saya dan banyak teman lain memilih libur karena hasil dan modal kerja tidak akan seimbang."

Kenaikan BBM, juga membuat sebagian besar nelayan di pantai utara Jawa Tengah menyandarkan kapal mereka. Mereka menuntut pemerintah memberi kompensasi tambahan.

Ribuan kapal nelayan di Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, dan Demak disandarkan di beberapa pelabuhan. Biasanya, pada siang hari, mereka sibuk dalam antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Tapi, kemarin, mereka memilih beristirahat dan tidak melaut.

"Kami makin terpuruk. Apalagi, saat ini kondisi tangkapan di laut masih paceklik," papar Suwarno, 42, nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pekalongan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Pekalongan Rasdjo Wibowo mengatakan akibat kenaikan BBM ini, ribuan nelayan di pantura terpuruk.

"Nelayan tidak hanya butuh kompensasi BLT tetapi juga subsidi tambahan. Bentuknya bisa berupa peralatan penangkapan ikan, alat pendingin ikan maupun industri pengalengan ikan," tandasnya. (LD/AS/N-4)

116

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3.4

TAHUN 2008

Saham Tambang dan Perkebunan Bertahan

Diuntungkan karena komoditas ekspor berpatokan pada harga internasional.

JAKARTA — Terus meroketnya harga minyak dunia hingga menyentuh level US\$ 135 per barel memaksa pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak pada Jumat lalu. Kenaikan harga BBM ini tentu ikut mempengaruhi pergerakan harga saham di lantai bursa Indonesia.

Meski begitu, emiten sektor pertambangan dan perkebunan boleh berlega hati karena pergerakan harga sahamnya tak terpengaruh oleh kenaikan tersebut. Kemampuan bertahan saham emiten tambang dan perkebunan ini tidak lepas dari ikut-melonjaknya hasil produksi perusahaan tersebut, yang juga merupakan komoditas ekspor.

Chief Economist Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga komoditas ekspor, seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan logam, akan memberikan sentimen positif tersendiri. Kenaikan harga komoditas ini jauh lebih tinggi dan signifikan ketimbang peningkatan ongkos produksi akibat kenaikan harga BBM. "Mereka diuntungkan dengan naiknya harga komoditas karena ko-

Laba Emiten Tambang & Perkebunan

Emiten	Laba (Rp miliar)		Pertumbuhan (%)
	Mar.2007	Mar.2008	
Apexindo	5,4	93,9	1.642
Indo Tambangraya	57,5	174,3	203
Medco Energi	140,7	211,2	50
PTBA	199	286	44
Timah	314	487	55
Tunas Baru Lampung	2,1	128,2	6.005
Bakrie Sumatra P	18,5	165,0	792
Astra Agro	268,8	827,0	208
PP London	91,3	267,2	193
Smart	187,6	422,7	125



Laporan keuangan emiten/viva (Tempo)

moditas yang diekspor telah berpatokan pada harga internasional," kata Purbaya kepada *Tempo* kemarin.

Analisis pasar modal Finan Corfindo Nusa, Edwin Sinaga, juga mengatakan kenaikan harga komoditas akan membuat harga saham tambang dan perkebunan ini tetap naik. Menurut dia, ongkos produksi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM akan bisa ditutup dengan tingginya harga komoditas. Sedangkan biaya transportasi dianggapnya sebagai komponen yang kecil dan tidak akan berpengaruh.

Hanya, ia melanjutkan, saham sektor perkebunan tidak akan menanggung kenaikan semanis saham pertambangan. Sebab, pajak ekspor CPO yang cukup besar masih bisa berpengaruh, sedangkan ekspor tambang

tidak ada halangan," kata Edwin.

Mengenai pergerakan harga saham, analis pasar modal PT BNI Securities, M. Alfatih, melihat mayoritas saham emiten pertambangan berada dalam tren naik. Ia menyebutkan, secara teknikal, saham PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bumi Resources Tbk sedang dalam posisi *uptrend*.

"Hanya PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco) dan PT Energi Mega Persada Tbk yang mengalami *downtrend*, sedangkan PT Medco Energi Internasional Tbk berada dalam posisi resisten," kata Alfatih.

Untuk saham perkebunan, tren kenaikan harga berpotensi terjadi pada PT Bakrie Sumatera Plantations dan PT Astra Agro Lestari. ● WAHYUDIN FAHMI

117

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEL** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2008

ADMINISTRASI

Catatan untuk Pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai

Oleh MARIA HARTININGSIH

Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dapat menjadi faktor pendorong penurunan kualitas hidup warga, gizi buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Subsidi melalui bantuan langsung tunai tak dapat mempertahankan asupan gizi dalam keluarga kalau para pengambil kebijakan tidak memahami relasi kuasa dalam rumah tangga.

Binny Buchori dari Perkumpulan Prakarsa, aktivis Lies Marcoes-Natsir, serta Masruchah, Koordinator Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), yang dihubungi terpisah, Sabtu (24/5), menarik proyeksi senada mengenai kondisi pasca-kenaikan harga BBM rata-rata 28,7 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM memperjelas wajah feminisasi kemiskinan," ujar Binny. "Perempuan berada di baris terdepan karena mereka mengemudikan ekonomi rumah tangga," sambung Binny, yang memimpin organisasi nonpemerintah di bidang riset dan peningkatan kapasitas menyangkut peran negara, peran masyarakat warga, globalisasi, dan desentralisasi itu.

Bu Sabar

Inilah yang terjadi pada banyak warga. Salah satunya adalah Bu Sabar (51). Dampak dari dua kali kenaikan harga BBM pada tahun 2005—rata-rata 29 persen pada bulan Maret dan 128 persen pada bulan Oktober—terhadap ekonomi keluarga pun belum pulih sampai saat ini.

"Sebelum diumumkan kenaikan harga BBM pun, harga pangan udah naik beberapa kali," lanjutnya.

Bu Sabar adalah satu dari warga yang bermukim di perkampungan padat di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Ia berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Bersama suami, empat anak, dan satu cucu, ia menempati sebuah kamar berukuran 4 meter x 5 meter dengan sewa Rp 500.000 per bulan. Empat anaknya masih sekolah, satu cacat fisik. Satu cucunya dititipkan anak perempuannya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di daerah Bekasi. Ekonomi keluarga itu disandarkan pada keahliannya sebagai pemijat karena suaminya tidak bekerja.

Bu Sabar dan keluarganya tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) Rp 300.000 per tiga bulan pada tahun 2005. Sekarang ia juga tidak bisa berharap dari bantuan itu. "Kami

tidak punya kartu keluarga," katanya.

Karena pemberian BLT bergantung pada data kelurahan dan surat-surat resmi menyangkut status keluarga, program seperti itu bisa bersifat diskriminatif terhadap orang miskin yang tidak memilikinya.

"Itu baru soal administrasi. Soal lainnya adalah kategori 'keluarga miskin'," ujar Binny.

Banyak keluarga tidak masuk dalam kategori itu meskipun ekonomi mereka sangat kritis. Bahkan, menurut Binny, keluarga menengah pun terkena dampaknya secara signifikan.

"Waktu kenaikan harga BBM Oktober 2005, murid saya tinggal satu dari 50 orang. Kursus musik tak dianggap penting karena itu dipotong duluan dari prioritas keluarga," ujar Irianto Djoko Kustijatno (46), guru musik dari Salatiga.



Seharusnya kita memiliki sistem dan nilai sosial yang komprehensif untuk menghadapi situasi seperti ini. Sistem itu bisa dibuat berdasarkan perhitungan perpajakan kita.

Binny Buchori

Ekonomi keluarganya pun terhantam. "Dalam sekejap, penghasilan kami tinggal Rp 100.000 sebulan dari Rp 5 juta sebelumnya," ujarnya. Situasi itu belum pulih sampai sekarang.

Relasi kuasa

Menurut Binny, kejutan akibat kenaikan harga BBM ditambah inflasi tak bisa ditahan dengan kompensasi melalui BLT atau program-program lain. "Ini sangat berat bagi perempuan," ujar Lies Marcoes, "Apalagi, penentuan prioritas-prioritas di dalam rumah tangga dipengaruhi relasi kuasa antara dia dan suaminya."

Karena sasaran BLT adalah keluarga, dalam banyak kasus, secara otomatis laki-laki kepala keluarga akan menentukan prioritas itu. "Mereka akan memakainya untuk membeli rokok karena itu penting untuk menghindari stres," ujarnya.

Dengan begitu, pemberian BLT tak hanya salah sasaran, tetapi juga salah prioritas. "Jagankan mempertahankan asupan gizi keluarga, yang akan terjadi malah penurunan karena pemerintah abai terhadap relasi jender dalam keluarga," sambungnya.

Menyambung Lies, Marsruchah mengatakan, penurunan kualitas hidup sebagian besar warga tak sulit diprediksi. "Generasi ke depan anak-anak kita akan semakin buruk kualitasnya," sambungnya, seraya mengingatkan ancaman peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak situasi ini.

"Peristiwa orangtua, khususnya ibu, yang membunuh anaknya dan kemudian membunuh dirinya sendiri, peristiwa-peristiwa kekerasan dalam keluarga, tak bisa lagi disebut kasus atau fenomena," sambungnya.

Mengutip survei beberapa media massa, Masruchah mengatakan, 30 persen dari kasus bunuh diri disebabkan faktor kelaparan dan kemiskinan akut.

"Faktor ini tidak dilihat pemerintah sebagai hal signifikan. Apa ini bukan kekerasan negara?" ujar Masruchah. Ia juga mengingatkan kemungkinan digunakannya standar-standar moral dan agama untuk menjawab keterpurukan ini karena pemerintah mulai mengadopsi cara-cara itu.

Harus sistemik

Kalau harga BBM memang harus naik, seperti dikemukakan Lies, seharusnya ada persiapan komprehensif, jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selama ini, menurut Binny, tanggapan pemerintah adalah responsif, bukan proaktif. Ia menyebut bantuan operasional sekolah (BOS) di bidang pendidikan, jaringan pengaman sosial (JPS), juga program-program keuangan mikro, kemudian BLT sebagai contoh pendekatan itu.

"Seharusnya kita memiliki sistem dan nilai sosial yang komprehensif untuk menghadapi situasi seperti ini. Sistem itu bisa dibuat berdasarkan perhitungan perpajakan kita," ujar Binny.

Ia menambahkan, "Kalau para pengambil keputusan mengatakan kenaikan ini terjadi akibat naiknya harga minyak dunia, mereka membutuhkan pengetahuan bahwa di negara-negara maju ada subsidi pangan, ada jaminan keamanan sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di sini, kita punya apa?"

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 35

TAHUN 2008

KEHIDUPAN

Kenaikan Harga BBM dan Nasib Perempuan

Kelompok masyarakat yang paling resah dan berpotensi menjadi kelompok paling rentan akibat kebijakan kenaikan harga BBM untuk kali ketiga pada era pemerintahan SBY-JK adalah komunitas miskin.

Oleh **ARI KRISTIANAWATI**

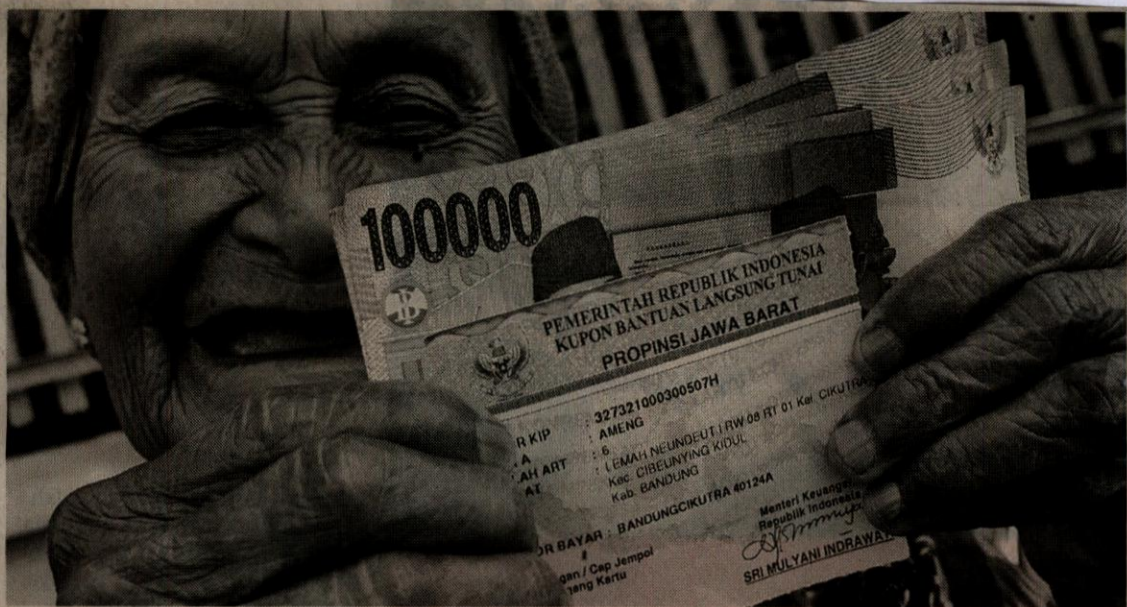
Komunitas miskin di Indonesia pascakenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005 dalam data Program Pembangunan PBB (UNDP) diperkirakan mencapai 65 juta orang. Dari kelompok penduduk miskin itu, 60 persen adalah perempuan. Mereka bekerja di sektor domestik atau publik, sebagai buruh, petani penggarap, di sektor informal, hingga ibu rumah tangga.

Kaum perempuanlah yang sesungguhnya paling dirugikan dalam kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM, atau dalam makna sesungguhnya pengurangan subsidi akibat paradigma ekonomi neoliberal tim ekonomi pemerintahan SBY-JK, akan memicu kenaikan inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan sekaligus menurunkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, serta menambah angka pengangguran.

Indeks gini, yaitu angka kesenjangan ekonomi makro/mikro, juga akan meningkat. Logika pemerintah yang mendewakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan pengusaha asing dan *the haves/the ruling class* sebesar 6,5 persen pascakenaikan harga BBM tahun 2005 adalah pengaburan fakta bahwa indeks gini kemiskinan masyarakat semakin membesar.

Bagi kaum perempuan, kenaikan harga BBM memiliki dampak psikologis, sosiologis, dan ekonomis. Dampak kenaikan harga BBM adalah meningkatnya jumlah penderita gizi buruk pada ibu hamil dan anak balita serta menyulitkan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan rumah tangga. Akibatnya, kualitas hidup dan gizi keluarga menurun.

Lebih buruk lagi, pemiskinan itu akan memperluas praktik perdagangan perempuan dan anak di kalangan perempuan



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ameng (80), warga Kelurahan Cikutra, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, setelah menerima uang bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Cabang Cikutra, Jalan Surapati, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/5).

miskin dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam berbagai riset tentang jender versus kemiskinan berbagai LSM terlansir data, 90 persen faktor penyebab meluasnya angka perdagangan perempuan dan anak adalah sosial-ekonomi, yaitu kemiskinan keluarga.

Demikian pula peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga di berbagai daerah probabilitas terbesar ada di dalam keluarga miskin. Kesulitan ekonomi menyebabkan para suami terkena dampak stres psikologis yang kemudian mendorong praktik kekerasan terhadap istri/perempuan.

Pascakenaikan harga BBM sampai 120 persen tahun 2005, beban ekonomi yang diderita keluarga miskin semakin berlipat. Ibu rumah tangga terpaksa harus menghemat secara "ekstrem", yang membuat kualitas hidup dan gizi keluarga menurun. Tidak mengherankan penyakit akibat kurang gizi kian meningkat.

Melanggar hak

Kebijakan kenaikan harga BBM, yang akan secara periodik dilakukan pemerintahan SBY-JK, sebenarnya merupakan wujud "penindasan" hak kaum perempuan untuk memperoleh kualitas kesehatan maksimum bagi bayi-anak-keluarga, hak terlindungi dari praktik perdagangan manusia, hak memperoleh upah layak, dan dipenuhinya

standar hidup baik bila bekerja di sektor industri.

Catatan lembaga Citra Kasih dalam riset "Buruh Perempuan dan Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi Budaya" (2006) menyebutkan, buruh di sektor industri-jasa dan manufaktur di Indonesia 64 persen adalah perempuan. Bisa dibayangkan apabila kenaikan harga BBM menekan sektor industri, upah buruh perempuan tidak akan meningkat, bahkan justru akan banyak PHK massal dialami buruh perempuan. Bisa-bisa buruh perempuan akan terdegradasi dalam mafia eksploitasi seksual berlabel prostitusi.

Memang ironis, pengambil kebijakan ekonomi dan penghapusan subsidi dalam kabinet pemerintahan SBY-JK adalah menteri ekonomi yang dua di antaranya perempuan, yakni Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) dan Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan).

Kedua menteri itu justru tidak memiliki kepekaan jender terhadap nasib kemiskinan perempuan akibat penghapusan subsidi. Adanya program liberalisasi ekonomi, salah satunya penghapusan subsidi BBM, yang berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya sosial lain, seperti biaya pendidikan dan kesehatan, akan membuat nasib perempuan semakin mengenaskan.

Saat ini, di dunia pendidikan, angka putus sekolah di kalangan

keluarga miskin meningkat. Sebanyak 75 persen anak/siswa yang putus sekolah umumnya perempuan.

Membangun jaringan

Menghadapi kebijakan liberalisasi ekonomi, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi harga BBM, gerakan perempuan harus bersama gerakan mahasiswa dan masyarakat menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

Gerakan perempuan akan bisa menjadi "penentu" suara publik apabila mampu membangun jejaring dan opini publik bahwa kenaikan harga BBM adalah sumber ketidakadilan bagi perempuan dengan menyodorkan fakta kenaikan harga BBM adalah kebijakan politik-ekonomi yang mendegradasi kualitas hidup kaum perempuan dan keluarganya.

Langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah adalah bentuk "pelecehan" hak asasi perempuan karena perempuanlah yang akan membelanjakan nilai BLT Rp 100.000 untuk belanja rumah tangga, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Untuk itulah, kaum perempuan Indonesia harus mengambil langkah tegas tak menjatuhkan pilihan kepada pemimpin yang bakal memiskinkan masyarakat.

ARI KRISTIANAWATI
Guru SMAN 1 Sragen,
Jawa Tengah

Kenaikan BBM yang ketiga kalinya telah menjadi bukti bahwa pemerintah SBY-JK hanya mau mengambil jalan pintas dan tidak mau mengoreksi strategi pengelolaan sumber daya alam (SDA) energi yang telah menyimpang jauh dari amanat konstitusi.

Penolakan yang dilakukan oleh anggota DPR, meskipun dengan intonasi yang beragam, sangat beralasan. Daya beli masyarakat dan daya saing industri memang akan semakin tertekan dengan kenaikan harga BBM. Sejak tahun lalu kenaikan harga bahan pangan telah terjadi. Tahun 2007 inflasi pangan sebesar 11,4% atau dua kali lipat inflasi umum. Padahal bagi masyarakat bawah inflasi yang dihadapi lebih tinggi bisa mencapai dua kali lipat inflasi nasional. Bila tiga perempat pengeluaran kelompok ini untuk makanan, sebelum kenaikan harga BBM daya beli mereka telah lama tergerus oleh kenaikan harga pangan.

Keberatan para kepala daerah atas program BLT sangat masuk akal karena kenaikan harga BBM memang akan menimbulkan ongkos ekonomi dan sosial yang tidak sedikit. Alasan ini tidak salah karena dengan kenaikan harga BBM sebesar 28,7%, yang dihitung oleh pemerintah hanyalah potensi penghematan finansial dalam APBN-P 2008 yang sebesar Rp 25 triliun. Tetapi kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat akan jauh lebih besar dibanding penghematan finansialnya.

Reencana keputusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana diprediksi pelaku usaha di sektor industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, merupakan satu contoh ongkos ekonomi yang akan ditanggung masyarakat dan belum diperhitungkan oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM tahun 2005 berdampak besar bagi sektor industri terutama manufaktur. Sejak 2004, telah terjadi percepatan deindustrialisasi sehingga pertumbuhan yang pada 2004 masih sebesar 7,4%, tahun 2008 diprediksi dibawah 5% karena tingkat pertumbuhan yang terus menurun.

Kenaikan harga BBM saat ini akan semakin memberatkan industri, karena sebelumnya industri telah tertekan oleh kenaikan biaya produksi akibat tingginya berbagai bahan baku dan kali ini akan tertekan akibat daya beli masyarakat yang merosot sehingga menurunkan permintaan.

Masyarakat miskin pun apatis dengan BLT yang dibagikan sebagai pemanis kenaikan harga BBM. Selain masalah data lama, besaran BLT Rp 100.000 per keluarga per bulan juga tidak jelas dasar perhitungannya. Karena menurut pemerintah, program kompensasi "hanya untuk sedikit mengurangi beban masyarakat" bukan mengompensasi. Ini sungguh tidak adil karena tambahan beban bagi masyarakat pasti, tetapi kompensasi sangat tidak pasti. Tahun 2005 kenaikan harga BBM menambah jumlah orang miskin sekitar 4 juta, apalagi program kompensasi saat ini yang tanpa persiapan.

Berbeda dengan pernyataan Presiden SBY pada 2005 yang menjanjikan kenaikan harga BBM saat itu adalah yang terakhir, saat ini pemerintah SBY-JK justru menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tahun ini bukan yang terakhir. Pernyataan tersebut tidak mengagetkan karena tujuan utama kenaikan harga BBM memang untuk mencajuti subsidi, bukan sekadar penyelamatan APBN-P 2008.

Kalau sekadar menyisihkan Rp 25 triliun, banyak cara yang dapat dilakukan dengan lokasi anggaran tanpa membebani ekonomi yang sedang terpuruk. Penundaan pembayaran bunga rekap saja akan menghasilkan paling tidak Rp 40 triliun. Belum lagi pemotongan belanja modal karena hingga akhir April baru terealisasi 6%.

Namun, pemerintah telah memilih menantang badai yang akan mengguncang ekonomi nasional. Kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi yang menurut Bank Indonesia bisa mencapai 12%. Meskipun naiknya inflasi tidak pada sisi penawaran, karena selama ini kemampuan Tim Ekonomi SBY-JK sangat tidak memadai dalam meredam inflasi, maka dipastikan BI akan memilih kebijakan kontraktif. Tingkat suku bunga SBI dipastikan akan segera terkerek naik.

Artinya, APBN-P 2008 akan segera direvisi kembali paling lambat pada Juli 2008. Selain akibat kenaikan harga BBM, APBN-P jilid II harus dilakukan karena target-target APBN-P memang terlalu optimistis. Inflasi dan suku bunga yang pada APBN-P 2008 ditargetkan 6,5% dan 7,5% tidak akan terpenuhi. Demikian pula pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% akan sulit tercapai.

Belum lagi penerimaan pajak dalam negeri yang diharapkan sebesar Rp 892 triliun sangat berat karena penerimaan pajak tahun 2007 dengan pertumbuhan 6,3% hanya berkisar Rp 400 triliun. Perkembangan-perkembangan ini akan menciptakan ketidakpastian baru karena kesalahan pilihan kebijakan.

Di samping itu keberpihakan kebijakan yang tepat juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Bila menghadapi resesi ekonomi, pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi dan menyuntikkan dana besar untuk pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia justru merespons dengan langkah sebaliknya.

Demikian pula saat menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Pilihan kebijakan yang diambil malah seperti negara yang tidak memiliki SDA energi. Langkah pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM dibanding merombak strategi pengelolaan SDA energi akan semakin menjauhkan Indonesia dari kebangkitan ekonomi.

Pada akhirnya hanya ada satu solusi yang harus dilakukan yakni mencari pemimpin baru yang berani mengembalikan kepemilikan berbagai SDA karena inilah salah satu kunci kebangkitan ekonomi Indonesia. □

Penulis adalah Managing Director Econit

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 8										TAHUN 2008	

Sejumlah Daerah Tunda Pencairan BLT

JAKARTA - Pencairan bantuan langsung tunai (BLT) masih ditunda di sejumlah daerah, termasuk Bogor dan Depok yang merupakan penyangga Ibu Kota Jakarta. Semula, bantuan uang tunai untuk rakyat miskin itu dijadwalkan mulai cair Sabtu (24/5).

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla meninjau hari pertama pelaksanaan penyaluran BLT di beberapa kantor pos di Jakarta. BLT ini merupakan program terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi per Sabtu lalu. Harga jenis premium naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000, solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter, dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.

Pada penyaluran BLT tahap pertama 24-30 Mei 2008, keluarga miskin mendapat dana Rp 300 ribu untuk alokasi bulan Juni-Agustus 2008. Sedangkan penyaluran periode kedua sebesar Rp 400 ribu akan dilakukan September 2008, untuk jatah selama empat bulan.

Berdasarkan pantauan *Investor Daily* di Kota Bogor,

Sabtu lalu, tidak ada pencairan BLT di Kantor Pos Pusat di Jalan Juanda dan 23 kantor cabang yang lain. Kegiatan kantor berjalan seperti biasa, tidak ada kesibukan yang menonjol terkait pembagian BLT. "Belum ada pencairan BLT, karena pengumuman belum ada. Rencana pencairan masih dirapatkan," ujar Iqbal, staf Kantor Pos Cabang Jalan Raya Puncak, Bogor.

Hal senada disampaikan Muidin, petugas operasional Kantor Pos Cabang Warung Jambu, Bogor. Ia menjelaskan, BLT kemungkinan baru dibagikan minggu ini. Seluruh kantor cabang juga belum melakukan persiapan untuk pembagian BLT, seperti pemasangan tenda serta kursi untuk menampung antrean penerima BLT. Halaman kantor yang sedianya digunakan untuk memasang tenda, masih digunakan sebagai tempat parkir.

Di Depok, sejumlah pengurus RT bahkan mengaku tidak diberi informasi apa pun dari petugas kelurahan maupun RW terkait pembagian BLT. Hasnan, Ketua RT 06/RW 15 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, curiga pihak kelurahan memakai data

warga miskin yang sudah usang, padahal pihaknya bisa menyiapkan daftar terbaru.

Di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah warga miskin mengaku kecewa karena penyaluran BLT belum dilakukan PT Pos Indonesia, Sabtu lalu. Staf PT Pos Indonesia bernama Ina mengatakan, pihaknya belum mendapat instruksi resmi penyaluran BLT dari pemerintah.

Berdasarkan pantauan *Antara*, pembagian BLT kali ini lebih tertib dibanding tahun 2005. Di Semarang, penyaluran BLT di kantor pos maupun balai kelurahan berlangsung lancar. Antrean panjang di sejumlah tempat pembayaran hanya terlihat sekitar dua jam pertama setelah loket dibuka, selanjutnya warga yang datang langsung bisa dilayani.

Namun, pencairan kupon BLT di Kantor Pos Andir di Kota Bandung (Jawa Barat) sempat ricuh. Warga bernama Yeni (45 tahun) tiba-tiba mengamuk, karena tidak menerima BLT. Ibu empat anak itu langsung berteriak histeris, sambil meminta dirinya didaftarkan sebagai penerima BLT. (pam/ban/mam/c105)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

Program BLT Diragukan

Oleh Toidin Bintarnyu

► JAKARTA- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin tidak akan efektif menekan angka kemiskinan.

Soalnya, pemerintah masih menggunakan data 2005, sehingga banyak ketidaksesuaian dengan kondisi riil tahun ini. Kecuali itu, nilai nominal BLT yang tetap Rp 100 ribu sudah tergerus inflasi selama 2,5 tahun terakhir.

"Selama 2,5 tahun pasti terjadi perubahan konfigurasi orang miskin dan permasalahan ketidakakuratan program serupa pada 2005 akan terjadi pula pada 2008," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Akhmad Erani Yustika ketika dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Sabtu (24/5).

Selain itu, kata dia, nominal BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan atau sama dengan 2005 tidak akan optimal mencukupi kebutuhan kalori masyarakat miskin. Itu karena nilai bantuan sudah berkurang akibat tergerus inflasi. "Sekarang ini nilainya hanya tinggal separuhnya," ujarnya.

Dia menambahkan, program pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri juga tidak akan efektif melindungi masyarakat miskin dalam jangka panjang.

"Program seperti ini hanya

bagus di atas kertas," tandasnya.

Akhmad Erani Yustika menjelaskan, seharusnya pemerintah meluncurkan program yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam jangka panjang untuk meningkatkan daya beli, seperti pemberdayaan di sektor pertanian dan UMKM.

"Program BLT perlu untuk orang jompo atau cacat. Bagi orang miskin yang sehat, solusinya adalah membuka lapangan kerja permanen," paparnya.

Inflasi Kian Tinggi

Pengamat ekonomi Djoko Retnadi menjelaskan, kenaikan harga BBM akan meningkatkan harga bahan kebutuhan pokok, sehingga beban masyarakat bertambah.

"Kenaikan diperkirakan variatif sampai 5% untuk barang-barang dengan konsumsi BBM rendah. Namun, komoditas dengan konsumsi BBM tinggi seperti semen dan sektor transportasi, harganya bisa naik di atas 5%," ujarnya.

Djoko Retnadi memperkirakan laju inflasi semakin tinggi mulai Juni mendatang.

Variabel Rumah Tangga Miskin Penerima BLT:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m²
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu/berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Fasilitas tempat buang air besar di tempat umum
5. Sumber air minum berasal dari mata air tak terlindungi/sungai/air hujan
6. Sumber penerangan utama bukan listrik
7. Jenis bahan bakar untuk masak dari kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Tidak pernah membeli daging/ayam/susu dalam satu minggu
9. Frekuensi makan dalam sehari satu/dua kali
10. Tidak pernah membeli pakaian baru dalam setahun
11. Tidak mampu berobat ke Puskesmas/RS bila sakit
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas 0,5 ha buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat Sekolah/SD/MI ke bawah
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
15. Tidak pernah menerima kredit usaha UKM/KUKM setahun lalu

Sumber: Diolah Investor Daily

Kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 28,7% bisa menambah laju inflasi 0,5-0,9% pada Juni 2008.

Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, masyarakat miskin penerima BLT relatif tidak akan berbeda dibandingkan 2005. Soalnya, pemerintah juga memasukkan kelas masyarakat yang hampir miskin sebagai penerima BLT.

"Jadi, kalau naik kelas sedikit tetap masih menerima BLT. Kecuali kalau naiknya sangat signifikan, tapi itu hampir tidak mungkin terjadi," kata Aburizal di Jakarta, Jumat (23/5) malam.

Menurut Mendag Mari Elka Pangestu, pascakenaikan harga BBM, harga barang kemungkinan naik 1-5%.

Berdasarkan data BPS (2005), rumah tangga berpenghasilan Rp 480 ribu per bulan masuk kategori sangat miskin, Rp 600 ribu per bulan

masuk kategori miskin, dan Rp 700 ribu per bulan mendekati miskin.

Pada 2007 sekitar 16,6% atau 37,17 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka itu turun dibanding 2006 sebanyak 39,30 juta orang. Tahun ini, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 34 juta orang.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kenaikan harga BBM sebesar 28,7% sejak 24 Mei akan mendorong inflasi hingga mencapai plus-minus 12-12,5% sampai akhir tahun.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang dilakukan 56 perguruan tinggi pada 2005, sebanyak 90,51% dana yang disalurkan tepat sasaran, 97,14% tepat jumlah, 89,10% tepat waktu, dan 75,93% tepat pemenuhan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

Harga Kebutuhan Pokok Naik Lagi

JAKARTA (MI): Harga-harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah langsung naik, sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini adalah kali kedua harga kebutuhan pokok naik dalam waktu kurang dari tiga pekan.

Kenaikan harga kebutuhan pokok yang pertama terjadi pada 7 Mei lalu. Itu berlangsung setelah dua hari sebelumnya pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM meskipun belum menentukan kapan harga baru BBM diberlakukan.

Ketika itu beras, terigu, minyak goreng, dan sayur-mayur di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan di beberapa wilayah lainnya langsung naik rata-rata 10%.

Kali ini, hal serupa terjadi lagi. Harga beras di Bandar Lampung, Yogyakarta, Banyumas, Cirebon, Madiun, dan Palembang naik Rp200-Rp500. Harga kebutuhan pokok lainnya juga naik antara 5%-10%. Artinya, selama Mei, harga kebutuhan pokok naik 15%-20%.

Kenyataan itu berbeda dengan prediksi pemerintah. Sesuai pengumuman kenaikan harga BBM, Menteri Perdagangan Mari Pangestu meyakinkan kenaikan harga pangan tidak terlalu besar.

"Pemerintah mengambil indikator kenaikan harga BBM pada Maret 2005. Saat itu dengan kenaikan harga 30%, dampak terhadap harga pangan hanya 1%-5%. Jadi, kali ini harusnya tidak besar juga."

Namun, di Pasar Besar Madiun, harga beras jenis bundar yang sebelum kenaikan harga BBM masih Rp4.500 per kg, kemarin menjadi Rp5.000 per kg. Kenaikan harga beras di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), mencapai Rp200-Rp300 per kg. Di tingkat pasar, harga beras Rp5.000 per kg untuk jenis IR 64 dari sebelumnya Rp4.700 per kg.

Pemicu naiknya harga beras adalah melonjaknya ongkos giling dan transportasi. "Di tingkat penggilingan, harga beras mencapai Rp4.300 per kg, naik dari sebelumnya Rp4.100 per kg. Kemudian masuk ke pedagang besar, harganya

menjadi Rp4.500 hingga Rp4.600 per kg. Di tingkat eceran harganya menjadi Rp5.000 per kg," papar Eko Purwanto, 37, pedagang beras di Rawalo, Banyumas.

Ketua Persatuan Penggilingan Padi Banyumas Wahyudianto mengatakan meski belum ada kenaikan secara resmi, sebagian penggilingan sudah menaikkan ongkos giling. "Kami tidak dapat berbuat banyak karena dengan naiknya harga solar, ongkos giling harus disesuaikan," ujarnya.

Di wilayah Cirebon, Jawa Barat, harga beras kualitas paling rendah sudah dijual dengan harga rata-rata Rp5.000 per kg. "Semula harga beras jenis ini di bawah Rp5.000," tutur Jaja, pedagang beras di Pasar Pagi, Cirebon.

Melonjak 100%

Selain beras, harga minyak goreng, sayur, dan bahan masakan juga terus naik. Bahkan di Pasar Oebobo, Oeba, dan Kasih, Kupang, Nusa Tenggara Timur, harga cabai merah keriting dan bawang merah melonjak tajam hingga 100%.

► "Kami tidak dapat berbuat banyak karena dengan naiknya harga solar, ongkos giling harus disesuaikan."

Wahyudianto - Ketua Perppadi

124

Cabai keriting yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20 ribu per kg mulai kemarin menjadi Rp45 ribu per kg. Bawang merah menjadi Rp50 ribu per kg, dari sebelumnya Rp25 ribu. "Kami menaikkan harga barang karena ongkos angkut sudah naik," tutur Johny, 25, pedagang di Pasar Tradisional Kasih.

Ongkos angkutan kota dari pusat penjualan palawija dan sayur-sayuran di Desa Tarus ke Kota Kupang naik rata-rata Rp2.000 (dari Rp5.000 menjadi Rp7.000).

Sementara itu, di Pasar Demangan Yogyakarta, harga semua jenis minyak goreng naik rata-rata 10% sejak Sabtu (24/5) atau beberapa jam setelah pemberlakuan harga BBM yang baru. Minyak goreng kemasan yang pada Jumat siang masih dijual Rp11.875 per liter, menjadi Rp12.325 per liter esok harinya.

Minyak goreng curah kualitas biasa naik dari Rp9.000 per liter menjadi Rp9.500 per liter. Harga minyak goreng curah kualitas bagus naik dari Rp11.375 per liter menjadi Rp12.375 per liter.

"Kami, para pedagang ini, tidak bisa berbuat banyak. Kami terpaksa menaikkan lagi harga minyak goreng karena memang harga kulakannya juga naik," kata Sri Yohana, pedagang di Pasar Pademangan. (Tim/X-11)

124

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Bursa Dibayangi Harga Minyak

Kenaikan harga BBM membuat APBN lebih aman.

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia mengalami apresiasi dari rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). IHSG telah menembus angka 2.300 dan 2.400 dalam waktu dua pekan, namun selanjutnya akan dibayangi tekanan dari tingginya harga minyak dunia.

Pengamat pasar modal dari Sarijaya Securities, Daniel Dwi Seputro, mengatakan, kenaikan BBM telah membuat kondisi APBN lebih aman. Ini akan mengembalikan kepercayaan pelaku pasar modal kepada pemerintah karena APBN diyakini tak akan mengalami defisit yang terlalu besar.

Jumat pekan lalu (23/5), IHSG ditutup pada 2.465,9 atau melemah 1,5 persen (39 poin). Namun turunnya indeks saham pekan lalu diyakini lebih banyak karena faktor regional. "Pekan ini masih akan terkoreksi karena bursa Amerika dan regional juga terkoreksi," kata Daniel, Ahad (25/5).

Menurut Daniel, pelaku pasar kini khawatir melihat harga minyak dunia yang makin merangkak naik dan pekan lalu sempat menembus 135 dolar AS per barel. "Bahkan ada yang memperkirakan minyak bisa tembus 200 dolar AS. Ini tak hanya menimpa bursa Indonesia tapi juga global. Akan ada tekanan pada inflasi," ujar dia.

Menurutnya, peluang indeks sa-

ham menguat pada Juni masih tetap ada, namun akan terbatas. Diperkirakan indeks masih bisa naik namun tetap di kisaran 2.400. "Paling mentok di 2.500 sampai akhir bulan Juni. Investor sebaiknya tetap main dalam jangka pendek," kata Daniel.

Dengan adanya ancaman harga minyak dunia, lanjut Daniel, maka sektor pertambangan batu bara dan kelapa sawit masih akan menjadi andalan. Sementara sektor telekomunikasi menurutnya tidak akan tumbuh setinggi tahun lalu karena persaingan ketat antaroperator.

Kepala Ekonom Institut Riset Danareksa, Purbaya Yudhi Sadewa, meyakini kenaikan harga BBM akan menyelamatkan bursa. "Sebelum BBM naik, indeks jatuh karena investor asing yakin APBN akan runtuh. Kenaikan BBM justru akan mengembalikan kepercayaan investor asing. Ini bagus bagi pasar modal kita," kata Purbaya.

Analisis Recapital, Poltak Hotradero, juga mengakui kenaikan harga BBM akan memberi kepastian bagi investor pasar modal karena asumsi APBN menjadi lebih jelas. Kalangan dunia usaha terutama perbankan juga sudah menyiapkan diri menghadapi kenaikan BBM. Beberapa bank sudah menaikkan provisi (pencadangan) untuk mengantisipasi naiknya kredit bermasalah.

Sementara sektor industri sementara ini sudah memakai BBM non subsidi sehingga hanya terpengaruh kenaikan biaya transportasi. Namun kenaikan BBM jelas akan mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pada sektor konsumsi dan *consumer goods*. ■ rto

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Kenaikan harga BBM dan prospek bisnis produk segar

Oleh HASANUDDIN YASNI
Direktur Eksekutif Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia

Tanpa kenaikan harga BBM, harga-harga produk pangan, terutama untuk produk segar dan bahan pokok lainnya telah mengalami kenaikan akibat pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pasokan produk.

Bahkan, di beberapa negara produsen kebijakan untuk memacu sektor industri nonpangan malah cenderung menurunkan produksi produk pangan. Selain itu, faktor pemanasan global juga menjadi pemicu kegagalan panen produk. Akibatnya, dunia dilanda krisis pangan dan dibarengi pula dengan krisis energi.

Tak luput pula, hal itu terjadi di Tanah Air. Indonesia yang semula mampu berswasembada pangan, bahkan mengekspor berasnya ke mancanegara, kini menjadi negara pengimpor meski *brand* sebagai negara agraris masih melekat.

Hal serupa berlaku di minyak bumi. Dulu sebagai

negara pengekspor minyak, Indonesia berpesta-pora jika harga minyak mentah dunia melonjak. Namun, hal itu tidak berlaku lagi walaupun Indonesia masih berstatus sebagai anggota OPEC.

Dari analisis Bank Dunia, Indonesia masih dapat dikatakan cukup baik dengan tingkat kenaikan harga pangan tidak terlalu tinggi, karena masih dapat dikontrol baik. Namun, amat disayangkan bahwa alam kita yang kaya dengan kandungan minyak, eksplorasi yang dilakukan pemerintah melalui badan usahanya (Pertamina) tidak maksimal dan tidak dapat mengimbangi permintaan domestik yang naik begitu cepat.

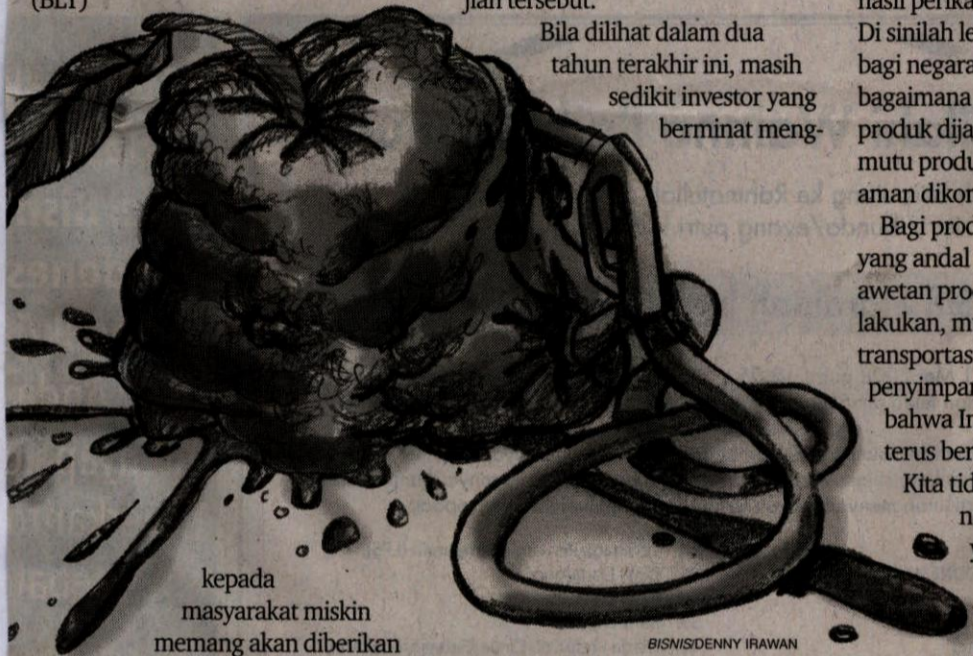
Konversi yang dilakukan sebagai antisipasi keadaan juga tidak dapat mengimbangi perubahan tersebut walau telah diformat rencana jangka pendek dan jangka panjangnya.

Subsidi dengan jumlah lebih dari

127

Rp200 triliun memang sangat mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Inilah kondisi dilematis yang akan dihadapi jika BBM dinaikkan hingga 30% yang diperhitungkan dapat mengurangi subsidi BBM sebesar Rp35 triliun atau kira-kira 15% dari total subsidi saat ini.

Dana bantuan langsung tunai (BLT)



kepada masyarakat miskin memang akan diberikan sebesar Rp100.000 per kepala keluarga per bulannya. Semua pihak berharap program tersebut dapat berjalan baik dibandingkan dengan pelaksanaan 2005 lalu.

Persoalannya, apakah hal ini dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas? Tentu saja tidak karena banyak sektor lain yang juga terkait atau terpengaruh kenaikan harga BBM. Sektor pangan dan transportasi merupakan salah satu sektor penting yang akan terkena dampak serius

Selama ini, kita selalu berfokus ke masalah transportasi umum yang berdasarkan data terungkap bahwa 30% biaya hidup manusia dihabiskan untuk transportasi. Padahal sebagai negara kepulauan, penyebaran pangan dan kebutuhan pokok sa-

ngatlah penting jika kita tidak ingin mendengar peristiwa gizi buruk di daerah.

Kenaikan harga BBM akan banyak memengaruhi pemasokan kebutuhan tersebut sehingga tidak tertutup kemungkinan pengiriman ke daerah terpencil miskin pangan akan di jauhi oleh distributor karena menyangkut dana distribusi yang kian mahal.

Revitalisasi lahan pertanian juta hektare sudah pula dikumandangkan oleh Presiden yang diikuti oleh disepakatinya kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang yang memasukkan sektor pertanian dalam klausul perjanjian tersebut.

Bila dilihat dalam dua tahun terakhir ini, masih sedikit investor yang berminat meng-

garap proyek revitalisasi itu dan lebih memilih menamakan dana di sektor lain, misalnya teknologi informasi.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita lebih memfokuskan diri ke sektor pangan dan energi. Apabila tidak ditangani dengan baik, kedua sektor vital ini akan menimbulkan dampak serius dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup manusia.

Untuk sektor pangan, infrastruktur merupakan hal penting untuk dibenahi jika distribusi pasokan produk ingin dicapai hingga ke pelosok. Selain itu, perlu dipertegas kebijakan dari pemerintah pusat agar hal ini dapat menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Penulis berpandangan sudah saat-

nya pula dibangun gudang-gudang penyimpanan produk yang dapat menahan laju pembusukan dan pemasokan produk dapat terus dilakukan walau pada *off-season*. Fasilitas pergudangan mempunyai potensi mengurangi penyusutan produk jika disimpan secara baik.

Saat ini dari data yang ada, penyusutan produk segar pertanian dapat mencapai 40% pada musim panen (*peak season*) dan dapat menurunkan pendapatan petani serta pedagang kecil dan distributor.

Harga produk anjlok karena kualitas yang tidak baik, bahkan di sektor hasil perikanan dapat mencapai 50%. Di sinilah letak permasalahan utama bagi negara-negara produsen, yaitu bagaimana manajemen pascapanen produk dijalankan di lapangan agar mutu produk terselamatkan agar aman dikonsumsi.

Bagi produk segar, rantai dingin yang andal merupakan sistem pengawetan produk yang paling aman dilakukan, mulai dari pascapanen, transportasinya, hingga ke gudang penyimpanannya. Perlu diakui bahwa Indonesia masih harus terus berbenah diri di sektor ini.

Kita tidak boleh kalah dengan negara lain seperti China, yang merencanakan

menginvestasikan proyek dimana rantai dingin ber-

peran seperti supermarket, transportasi, dan gudang di sentra pengumpul ataupun produksi dengan nilai sedikitnya US\$5 miliar dalam lima tahun mendatang. China serius melakukan hal ini untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.

Dengan dukungan rantai dingin yang andal, nilai tambah produk diharapkan dapat menekan kenaikan rata-rata harga produk dan lebih menguntungkan produsen (petani) domestik. Jika revitalisasi lahan memerlukan waktu *recovery* yang cukup lama, sektor ini relatif lebih cepat dalam mengamankan stok pangan, terlebih lagi untuk meredam dampak kenaikan harga BBM.

BISNIS/DENNY IRAWAN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> O
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 9 TAHUN 2008	

Tajuk Utama

Fokuslah pada rakyat kecil

Seperti pengamatan harian ini beberapa pekan terakhir, demonstrasi dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan aktivis masyarakat, masih saja marak menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demonstrasi itu sah-sah saja. Mereka normal-normal saja mengemukakan perasaan kepada pemerintah di negara yang menganut sistem politik yang demokratis ini.

Namun, harian ini berpendapat pemerintah rasanya tidak perlu terlalu merisaukan rangkaian aksi unjuk rasa itu. Mengapa? Pemerintah lebih baik fokus pada 'pertolongan pertama' kepada rakyat kecil yang paling terkena dampak kenaikan harga BBM.

Pasalnya, harian ini melihat, sebagian demonstrasi itu boleh dikata lebih banyak dimanfaatkan oleh sekelompok elite, terutama menjelang Pemilu 2009. Mereka mendompleng kenaikan harga BBM sebagai peluru untuk berpolitik.

Oleh karena itu, energi pemerintah lebih baik dicurahkan untuk mengatasi hal-hal yang jauh lebih *urgent*. Sebab berbagai persoalan bisa jadi muncul setelah kenaikan harga per liter premium dari Rp4.500 menjadi Rp6000, solar dari Rp4.300 menjadi Rp5.500, dan minyak tanah dari Rp2.300 menjadi Rp2.500.

Kenaikan harga BBM, dengan rata-rata 28,7% per 24 Mei 2008 itu, menimbulkan dampak yang tidak ringan bagi kelompok masyarakat termiskin. Kelompok ini kebanyakan diam dan tidak turun ke jalan. Inilah yang *urgent* itu.

Pemerintah memang telah membuat sejumlah program kompensasi, seperti bantuan langsung tunai (BLT), yang mulai dibagikan kepada masyarakat miskin. Kompensasi lain di antaranya program pemberdayaan masyarakat di kecamatan serta kredit usaha rakyat.

Namun, program itu saja rasanya jauh dari cukup. Perlu dipikirkan mekanisme pertolongan yang bersifat le-

bih jangka menengah panjang.

Jadi, yang dibutuhkan sebenarnya bukan sekadar mengisi perut dalam jangka pendek, melainkan juga untuk membantu masyarakat termiskin dalam menjaga kelangsungan kehidupan, pendidikan, dan kesehatan mereka, selain memfasilitasi para pekerja di kelompok menengah bawah. Sebab mereka ini yang paling terpuak dengan kenaikan harga BBM.

Dalam tujuan itu akan jauh lebih baik jika kompensasi sosial yang disediakan pemerintah setelah kenaikan harga BBM juga menyentuh secara lebih mendalam program yang berkaitan dengan berbagai persoalan riil yang mereka hadapi.

Untuk itu, fokus anggaran pemerintah rasanya perlu dipertajam. Pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seyogianya menjadi instrumen pokok dalam peningkatan efektivitas program kompensasi lanjutan tersebut, selain sekadar memberikan BLT atau BLT plus.

Di bidang pendidikan, misalnya, tak ada salahnya alokasi anggaran untuk sekolah lebih diutamakan bagi pemberian beasiswa kepada anak didik yang tidak mampu, atau setidaknya pembebasan uang sekolah.

Begitu pula di sektor kesehatan, fasilitas kesehatan murah, kalau perlu gratis, hendaknya menjadi program prioritas. Juga di bidang infrastruktur dan transportasi publik.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan subsidi langsung bagi sektor transportasi publik guna mengakomodasi kepentingan pekerja menengah ke bawah. Kelompok ini paling terpuak oleh kenaikan biaya transportasi akibat kebijakan menaikkan harga BBM.

Kita percaya kebijakan yang terakhir ini selain membantu menolong masyarakat dari dampak terburuk kenaikan harga BBM juga diharapkan dapat memacu masyarakat menggunakan transportasi publik. Ini berarti membantu mengurai kemacetan sekaligus menghemat penggunaan BBM itu sendiri.



■ MI/FAISHOL TASELAN

PEMBAGIAN BLT: Karena tidak mampu berjalan, Suliah, 69, warga Kelurahan Sawunggaling Surabaya, Jawa Timur, terpaksa menerima BLT di atas becak di Kantor Kecamatan Wonokromo Surabaya, Sabtu (24/5). Pembayaran BLT serentak dilakukan di 151 lokasi pembayaran di Kota Surabaya dan berlangsung tertib.

129

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT <u>NOV</u> DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 17		
TAHUN 2008		

Ketersediaan Dana Rp 4 Triliun Masih Dilobi Timah Akuisisi Tambang Di Myanmar dan Vietnam

Untuk menjadi perusahaan kelas dunia, manajemen PT Timah akan mengakuisisi tambang timah lepas pantai di Myanmar dan Vietnam.

DIRUT PT Timah, Wachid Usman, mengaku tengah menjajaki dukungan perbankan senilai Rp 4 triliun untuk akuisisi tersebut. Namun kini masih dalam proses menuju ke stand by loan (dana yang siap dicairkan setiap saat). "Sekarang pemain pertamba-

ngan (timah) sudah makin agresif, seperti di Vietnam sudah ada orang Kanada, China, Myanmar dan Kamboja, kenapa kita sebagai negara tetangga tak boleh ke sana," ujarnya di Pangkal Pinang, Jumat (23/5).

Rencana akuisisi tambang di dua negara itu, menurut Wachid bukan berarti tambang lepas pantai di Bangka dan Belitung sudah kurang prospektif.

Ia mengatakan, tambang di dalam negeri sudah tahu arahnya ke mana, sementara tambang di luar negeri perlu dilihat tujuannya sebagai bagian dari strategi menjadi

pemain timah terbesar dunia. "Daripada tambang-tambang di Myanmar dan Vietnam itu diambil orang lain. Kalau kita bisa ambil kan lebih baik lah," ujar alumni ITB itu.

Wachid menyatakan, biaya di tambang lepas pantai lebih murah ketimbang tambang darat. Untuk itu, manajemen menambah tujuh kapal hisap lagi. Lima dari tujuh kapal hisap itu dibuat di PT Dok dan Perkapalan Air Kantung senilai total Rp 170 miliar. "Kita juga mengadakan satu unit kapal wheel bucket senilai Rp 120 miliar," ujarnya. ■ DMS/JPNN



Hari Libur Tetap Bagi BLT

Meski hari libur, PT Pos di Palembang tetap buka. Total dana yang disalurkan di sana mencapai Rp 6 miliar. Ada 2.000 warga yang mengambil BLT, kemarin.

mencari pekerjaan sangat sulit, apalagi dengan gaji yang hanya Rp 250.000 per bulan, sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sekarang serba mahal. "Makanya BLT sangat membantu kami, orang kecil," ucapnya.

BLT Ambon Telat
Penyaluran BLT di Ambon belum terlaksana, karena jumlah keluarga miskin di Kota Ambon belum semuanya terdata.

Walikota Ambon MJ Papilaja mengatakan, pembagian BLT belum dilakukan, karena data rinci keluarga miskin di tempatnya belum dikirim oleh Pemerintah Pusat.

"Saya baru selesai rapat dengan Kepala Kantor Pos dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon membicarakan masalah ini, namun belum ada instruksi lebih lanjut, karena data-data keluarga miskin belum dikirimkan dari Jakarta," papar Papilaja, kemarin.

Meski begitu, dia meminta BPS daerah melakukan pencocokan data, sehingga pihaknya memiliki data awal sebelum penyaluran BLT dilakukan.

Walikota juga akan membuka posko pengaduan masyarakat mengenai penyaluran BLT, di setiap kantor Kecamatan.

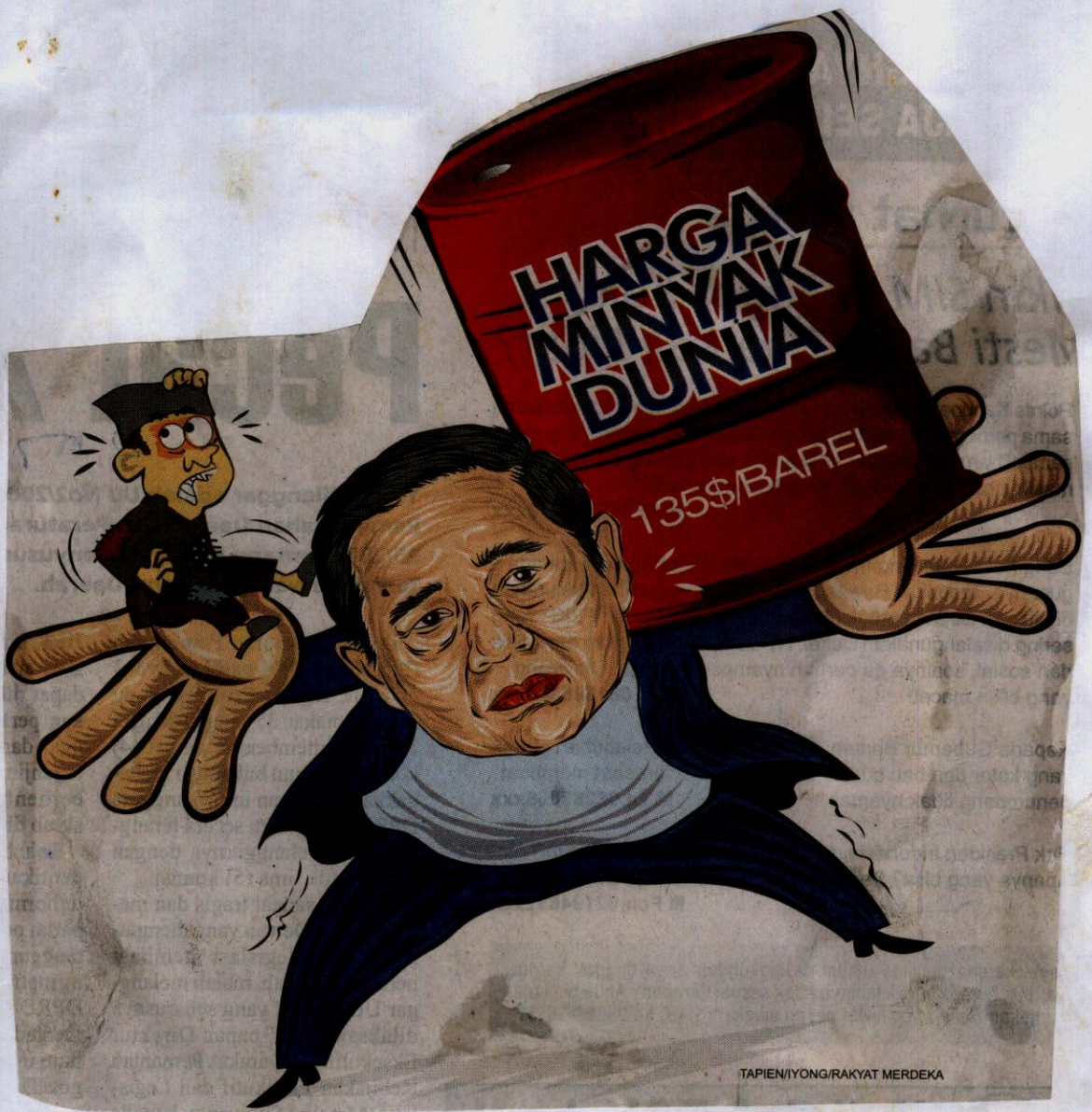
Untuk mengantisipasi adanya salah persepsi tentang keluarga miskin ungkap Papilaja, maka, dibuatkan kriteria umum keluarga miskin mengacu kepada BPS. "Kalau kriterianya tidak jelas, nanti membingungkan, karena banyak kriteria orang miskin, baik yang dibuat oleh askes atau penerima raskin (beras miskin). Acuannya BPS saja," katanya.

Di Palembang, sebanyak 20 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) sudah mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I. Meski hari libur, PT Pos di Palembang tetap buka, dan total dana

yang disalurkan melalui di sana mencapai Rp 6 miliar.

Kepala PT Pos Indonesia Cabang Palembang Jan Pieter mengatakan, tidak terlihat antrean warga saat mencairkan BLT. Pihak pos membuka sembilan loket di luar kantor. "Saya pikir banyak warga tidak tahu, jika hari Minggu (kemarin) kita tetap buka. Ada 2.000 warga yang mengambil BLT," ujar Pieter lagi.

Di antara ribuan warga yang mencairkan BLT, tampak seorang nenek bernama Tarmi (83), warga Lorong Sukadamai No 558, RT 14, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan IB II duduk termenung di halaman Kantor Pos Merdeka. Saat ditanya, Tarmi mengatakan datang karena ingin dapat jatah BLT, tapi namanya ternyata tidak masuk dalam daftar penerima. Beberapa warga menyarankan agar Tarmi menemui Ketua RT atau Lurah tempat ia tinggal. ■ JPNN



132